

**STRATEGI PEMENANGAN PEMILU LEGISLATIF  
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA  
DI PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Politik Islam**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2011 013 P1	No. REG : U-2011/P1/13 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**MOHAMMAD IKBAL  
NIM. E34205003**

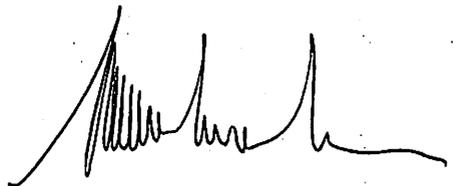
**FAKULTAS USHULUDDIN  
PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

2011

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Skripsi yang disusun oleh M. Iqbal ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk diujikan**

**Surabaya, 25 Januari 2011**



**Ainur Rofiq Al-Amin, SH, M.Ag  
NIP. 197206252005011007**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Mohammad Ikbal** ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan diterima untuk memenuhi salah satu dari persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Strata Satu  
(S-1) Ilmu Sosial

Surabaya, 02 Februari 2011

Mengesahkan  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

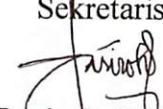
Dekan,  
  
**Dr. H. Ma'shum, M.Ag**  
NIP. 196009141989031001

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Ainur Rofiq Al-Amin, M.Ag.**  
NIP. 197206252005011007

Sekretaris

  
**Laili Bariroh, M.Si.**  
NIP. 19771103200912202

Penguji I

  
**Dr. Biyanto, M. Ag.**  
NIP. 195801311992032001

Penguji II

  
**Holilah, S.Ag. M. Si.**  
NIP. 197610182008012008

## **MOTTO**

**Tiada masa tanpa beriman, berilmu dan beramal**

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Siapa saja yang pernah berbuat baik kepadaku

## ABSTRACT

Thesis titled the 2009 legislative election winning strategy of national revival party cleric in Sumenep Kangean island is about the political strategy PKNU candidates in the 2009 election on the island Kangean Sumenep, political strategies that are used to create the desired power of politicians to get and take power in parliament. This political strategy used during the campaign to gain votes from the public.

Formulation of the problem under study is the first, how the relationship with NU PKNU Kangean island. Second, how the political strategies of candidates PKNU (a win) in the 2009 legislative elections on the island of Madura Kangean Sumenep.

Theoretical framework used is the relationship of Islam with political or religious ties with the country, so it is then that becomes the basis or reason for Muslims to enter in politics and political institutions and political parties formed to accommodate the aspirations of the community and to gain power.

The research method used is a qualitative approach to the type of field research (Field Research). Setting the research is Kangean island, Sumenep, data sources used were primary and secondary data sources, primary data is the result of interviews with informants, while the secondary data from books or browsing.

The findings of this study was, first, the political strategy of victorious candidates in applying the strategy of the formulation mission in accordance with community needs, imaging through the implementation of strategies and approaches made to the community leaders of parliamentary candidates.

Kata kunci: Strategi kemenangan, PKNU, Pulau Kangean

## KATA PENGANTAR

Puji Alhamdulillah, Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Ushuluddin dapat terselesaikan dengan baik. terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas karena adanya do'a kedua orang tua yang selalu mengiringi tiap langkah serta support dari teman-teman untuk selalu optimis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada ketua Prodi Politik Islam dan Pembimbing Skripsi saya serta dosen semua dosen yang ada di fakultas ushuluddin. Karena berkat arahan dan bimbingan mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

## DAFTAR ISI

Cover Dalam -----	i
Persetujuan Pembimbing -----	ii
Pengesahan tim Penguji -----	iii
Motto -----	iv
Persembahan -----	v
Abstrak ----	vi
Kata Pengantar -----	vii
Daftar Isi --	viii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Penegasan Judul -----	7
C. Rumusan Masalah -----	9
D. Tujuan Penelitian-----	9
E. Manfaat Penelitian -----	9
F. Metode Penelitian-----	10
G. Sistematika Pembahasan -----	13
BAB II LANDASAN TEORI -----	14
A. Islam dan Politik -----	14
B. Islam dan Politik di Indonesia-----	16
1. Islam dan Politik Era Revolusi -----	16
2. Islam dan Politik Era Orde Lama -----	18
3. Islam dan Politik Era Orde Baru -----	20
4. Islam dan Politik Era Orde Reformasi -----	24
BAB III SETTING PENELITIAN -----	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian -----	28
1. Sejarah Pulau Kangean -----	28
2. Keadaan Geografis -----	30
3. Keadaan Demografis -----	31
a) Kecamatan Arjasa -----	31
b) Kecamatan Kangean -----	32
BAB IV PENYAJIAN DATA -----	41
A. Profil Partai Kebangkitan Nasional Ulama -----	41
1. Latar Belakang Berdirinya PKNU -----	41
2. Lahirnya PKNU -----	44
a) Visi dan Misi PKNU -----	45
b) Asas dan Prinsip Dasar PKNU -----	48
c) Kepengurusan PKNU -----	49
3. Butir-Butir Kesepakatan Tim 17 Pendiri PKNU -----	52
B. MUKTAMAR I PKNU -----	55

BAB V ANALISA DATA -----	58
A. Hubungan PKNU dengan NU di Pulau Kangean -----	58
B. Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif PKNU 2009 di Pulau Kangean -----	60
1. Merumuskan Misi -----	61
2. Pencitraan -----	63
3. Target -----	63
4. Instrumen-instrumen Kunci -----	64
5. Implementasi Strategi -----	64
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	67
B. Temuan -----	67
C. Saran -----	68
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam pada awalnya adalah sebuah agama yang dipopulerkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau sendiri yang menjadi sumber ajarannya. Islam pada masa itu adalah pemahaman baru tentang tatanan masyarakat yang menuju peradaban manusia yang sesuai dengan moral dan budi pekerti dengan berdasarkan firman Tuhan. Ajaran Islam merupakan sebuah konsep yang berawal dari penerapan hidup Nabi Muhammad SAW kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat pada awal ajaran Islam adalah masyarakat yang belum mengenal tatanan moral dan budi pekerti serta etika kemanusiaan.

Islam awalnya muncul di Makkah, namun peradaban Islam berkembang di Madinah. Di Madinah inilah ajaran Islam berkembang pesat. Madinah adalah pusat peradaban Islam pertama, sebagai bukti sederhana adanya konsep peradaban masyarakat yang memiliki fungsi seperti sebuah negara pada masa sekarang, setelah masyarakat Madinah ditata oleh Nabi menjadi tatanan masyarakat modern yang paling awal. Walaupun pemerintahan pada saat itu masih sederhana, stabilitas sosial terjaga dengan baik. Hal ini pernah ditegaskan oleh Robert N Bellah seorang sosiolog Amerika, bahwa masyarakat Islam awal dapat disebut modern dalam hal tingginya tingkat komitmen. Dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya, untuk dapat menilai kemampuannya berdasarkan landasan-landasan

universalistik dan hal itu disimpulkan oleh upaya untuk meletakkan jabatan kepemimpinan yang tidak berdasarkan keturunan.<sup>1</sup>

Umat Islam menyepakati bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Al-qur'an. Dari Al-quran diturunkan dua intisari ajaran yang saling berkaitan, yakni akidah dan syariah. Tidak ada akidah tanpa syariah, begitu pula sebaliknya. Akidah menghubungkan eksistensi manusia dengan Allah. Eksistensi akidah tidak pernah berubah, atau terlepas dari perubahan tempat dan waktu. Sementara eksistensi terefleksi pada dua dimensi, yakni dimensi transendental dan dimensi sosial. Dimensi tansendental memberi makna relasional dengan tuhanNya, atau yang biasa disebut *ibadah*. Sedangkan dimensi sosial dari syariah mewujud pada hubungan antara sesama manusia, atau yang disebut *mu'amalah*.

Dalam kontek syariah, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut *siyasah*. dari konsep siyasah inilah kemudian lahir gagasan-gagasan yang dikenal sebagai Islam politik. Didalam tradisi ilmu-ilmu keislaman, kaitan relasional antara pemerintah dan rakyat menjadi bahan kajian dari disiplin *siyaasah syar'iah*, atau politik yang berbasis syar'i. disiplin ini bukanlah hal yang baru dalam Islam.

Dengan perspektif ini, Islam kemudian dipandang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari politik (negara). Bahkan schatt, seperti dikutip Yusuf Musa mengatakan, Islam bukan sekedar sebagai agama. Ia juga menjabarkan hukum dan politik. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada

---

<sup>1</sup> Robert N Bellah, *Beyon Believe: Menemukan kembali Agama*. Terj. Rudi Adi Syah Alam (Jakarta: Grafindo, 2002) . h,21

politik kecuali bersendikan pada syara' (Undang-Undang Islam), dengan basis pemahaman ini, lahir cita-cita untuk mendirikan Negara Islam merupakan sesuatu yang logis dan niscaya. Bentuk negara ideal Islam, menurut para penganut konsep ini, ialah negara Madinah pada masa Nabi SAW. Pada masa itu, Nabi SAW. Berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam (Ulama). Jika diteorisasikan, konsep negara yang ada dikala itu bisa dikatakan cukup unik, didalamnya sekaligus mengandung unsur-unsur berikut: Kenabian, Keumatan, Kenegaraan, dan administrasi pemerintahan. Negara terdiri dari komunitas agama dan politik sekaligus.<sup>2</sup>

Sebuah konsep politik pada masa awal Islam adalah Piagam Madinah yang menjadi peraturan resmi negara Madinah, yang menjadikan tatanan masyarakat teratur, pluralisme dijunjung tinggi antar etnis dan agama diberi kebebasan untuk berekspresi, namun tetap didasari oleh aturan-aturan moral agama masing-masing.

Dalam hal hubungan antar agama yang dianggap sebagai persoalan krusial, Nabi menerapkan kebijakan-kebijakan yang adil. Orang Islam mempunyai kewajiban zakat, sedangkan non Islam mempunyai kewajiban membayar jizyah, sebagai pajak kepada negara. Ini dilakukan untuk usaha membangun negara Madinah dan sebagian diserahkan kepada orang-orang miskin Madinah, sehingga ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya sedikit demi sedikit berkurang.

---

<sup>2</sup>Abd. Aziz *Politik Islam Politik* (Yogyakarta:Tiara Wacana,2006),18-19

Terjadi banyak perdebatan, khususnya tentang posisi Nabi pada saat itu, apakah ia juga sebagai pemimpin negara atau hanya sebagai pemimpin agama?. Perdebatan itu kemudian menjadi perdebatan yang panjang, sehingga muncul tiga teori tentang hubungan Agama dan negara. *Pertama*, bahwa Islam bukan semata-mata sebagai agama. Islam adalah satu agama yang sempurna, yang mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk juga politik (Negara). *Kedua*, bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan politik (Negara). Islam hanya dipahami sebagai agama. *Ketiga*, menolak dua teori sebelumnya, tapi menyatakan didalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berpolitik (Negara).<sup>3</sup>

Negara-negara yang berpenduduk Islam, sampai saat ini ada dua teori yang diperdebatkan, yaitu teori pertama dan kedua. Perdebatan itu dipicu oleh oleh tokoh-tokoh yang mencoba mengaplikasikan teorinya masing-masing. Maududi di Pakistan, Khomeini di Iran, Sayyid Qutb di Mesir. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang mendorong negara dengan sistem teori yang pertama, yaitu sistem teokrasi. Sistem yang di dalamnya tak dikuasai oleh kelompok agama manapun, tetapi oleh seluruh masyarakat disemua kelompok. Teori ini berdasarkan Al-Quran dan praktek Rasulullah. Landasan ideologisnya terletak dalam doktrin tauhid ke-Esaan Tuhan dan kehidupan manusiawi sebagai suatu program ibadah yang menyeluruh dan eksklusif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press) h,1-2.

<sup>4</sup> Abdul A'la Al-Maududi. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikurat, hlm.158-160

Indonesia dikatakan sebagai ranah Muslim di antara sekian banyak negara Muslim di berbagai dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam setidaknya memperkokoh hal itu, tetapi di dalam percaturan ekonomi dan politik nasional, nasib umat Islam Indonesia berlawanan dengan jumlahnya yang menempati urutan teratas di tengah-tengah penduduk Indonesia yang melimpah. Kemiskinan dan ketertinggalan seakan-akan menjadi menu keseharian umat Islam sejak masa penjajahan sampai dengan hari-hari terakhir dipenghujung orde baru, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Mayoritas umat Islam Indonesia masih berkubang di dalam pendidikan yang rendah, sektor pekerjaan yang kurang menguntungkan, kualitas hidup yang rendah dan status sosial ekonomi yang tidak menggembirakan. Situasi pasca Soeharto, seluruh kehidupan porak-poranda akibat dari pelaksanaan model kepolitikan yang bersifat *otoriter-birokratik*, semakin memperpanjang keterpurukan kehidupan umat.

Kondisi itu menantang para aktivis dan pemimpin muslim untuk membenahinya melalui perjuangan politik. Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dan gerakan politik Islam yang tumbuh dan berkembang di tanah air acapkali dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan pemikiran dan gerakan politik ditingkat global. Sekalipun tingkat pengaruh itu memiliki kadar yang berbeda. Struktur sosial dan politik di Indonesia yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan Negara-Negara Islam lainnya, merupakan bahan baku yang tidak dapat diabaikan oleh kalangan pemikir dan

aktivis dalam menciptakan rancang bangun perjuangan politik Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, maka perlu adanya kendaraan untuk dijadikan sebagai alat untuk menuju kepada cita-cita luhur guna menciptakan masyarakat madani, pada tanggal 5 Januari terbentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai gabungan partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti)<sup>5</sup>, Dalam sistem politik yang cenderung represif dan hegemonik, PPP dianggap sebagai satu-satunya Parpol yang mengakomodir aspirasi politik umat Islam. Disinilah NU kembali memainkan perannya. PPP berjalan tidak lagi berjalan secara harmonis. Menghadapi Pemilu 1977, barangkali bisa disebut sebagai klimaks dari keharmonisan empat Parpol Islam dalam wadah PPP. Puncaknya, pada Pemilu 1982, PPP kembali terkoyak-koyak. Akhirnya NU menyatakan kembali ke Khittah 1926 dalam Mukhtamarnya yang ke 27, 8-12 Desember 1984 di Situbondo. Keputusan NU kembali ke Khittah 1926 intinya NU tidak lagi menjadi pendukung PPP dan memberikan kebebasan kepada warganya mendukung parpol yang ada.<sup>6</sup>

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada tanggal 23 Juli 1998 yang merupakan basis masyarakat Nahdliyin.<sup>7</sup> Dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang didirikan melalui sebuah akad para ulama merupakan wadah untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia akan sebuah partai

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003) hal, 53

<sup>6</sup> Lihat Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKis, 1999), hal. 220

<sup>7</sup> Sahar L. Hassan, Kwat Sukardiyono, Dadi M.H. Basri, *Memilih Partai Islam, Visi, Misi dan Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press) hal, 24

politik yang mampu mengartikulasikan aspirasi mereka melalui para Kiai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

PKNU (partai kebangkitan nasional ulama) melihat bahwa saat ini bangsa Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi, belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada konsolidasi demokrasi yang ditunjukkan oleh adanya kekuatan pada konstitusi dan penegakan hukum secara serius akibat proses demokrasi kerap kali berjalan tidak seiring, itu sendiri masih bersifat elitis.<sup>8</sup>

Pada dasarnya kehadiran PKNU memiliki pengaruh dalam peta politik kaum *nahdliyin*. Artinya, saham politik kaum nahdliyin tak lagi didominasi oleh PKB dan PPP. Kompetisi semakin diramaikan dengan keberadaan PKNU. Dalam pemilu legislatif 2009 di pulau Kangean, pulau itu hanya mampu mengantarkan satu wakilnya di kursi DPRD, yang menarik caleg yang menang dari partai baru yaitu PKNU, partai ini mampu memperoleh suara lebih banyak dari suara yang diperoleh PKB dan PPP.

hal tersebut di atas sangat menarik untuk di bahas dalam penelitian ini mengingat partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) adalah partai baru di pentas politik Indonesia.

## **B. Penegasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu tegaskan bahwa judul penelitian ini adalah “*Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 PKNU di pulau Kangean*”.

---

<sup>8</sup> Ma'ruf Amin, *kenapa harus PKNU*, Jakarta: DPP PKNU, 2007, hal 24



Adapun beberapa kata yang perlu kita cermati dari judul diatas adalah:

Strategi Pemenangan : Rencana yang cermat mengenai langkah-langkah untuk mencapai sasaran (kemenangan).<sup>9</sup>

Pemilu Legislatif : Pemilihan Umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) Provinsi dan Kabupaten Kota.

PKNU : Adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama, yang didirikan pada tanggal 29 Syawal atau bertepatan dengan 21 November 2006 M. di Langitan, Tuban, Jawa Timur.<sup>10</sup>

Kangean : Kangean adalah salah satu pulau dari kepulauan Kangean, luasnya 430 km<sup>2</sup>, dan titik tertingginya mencapai 390 meter dpl. Kangean merupakan pulau terbesar di gugusan pulau Kangean, dan menjadi pulau yang paling signifikan dikawasan tersebut. Secara administratif, pulau ini berada di wilayah kabupaten Sumenep Jawa Timur, Indonesia dan merupakan suatu Kecamatan.

Jadi yang dimaksud judul tersebut adalah mempelajari dan mendiskripsikan strategi pemenangan pemilu legislatif 2009 PKNU.

---

<sup>9</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneasia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 964

<sup>10</sup>AD/ART Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Bab I Pasal 1, DPP PKNU, 2007

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar beklakang yang diuraikan diatas, selanjutnya akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan PKNU dan NU di pulau Kangean?
2. Bagaimana strategi kampanye caleg PKNU dalam pemilu legislatif 2009 di pulau Kangean?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan PKNU dengan NU di Pulau Kangean.
2. Menganalisis dan mengetahui strategi pemenangan yang dilakukan PKNU dalam pemilu legislatif 2009 di Pulau Kangean.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan khususnya bagi disiplin ilmu politik.

Sebagai upaya pengembangan ilmiah untuk menjelaskan bahwa strategi politik mempunyai peran dalam menentukan kemenangan dalam pemilu, baik dalam pilpres pilkada dan sebagainya.

### **F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, yang dimaksud untuk mengungkapkan tentang strategi pemenangan

PKNU dalam pemilu legislatif 2009 dan mendiskripsikan, menggambarkan atau menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antara fenomena dan diselidiki.<sup>11</sup>

Jenis penelitian adalah *case study* atau studi kasus. Penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subyek yang diteliti terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Dalam hal ini dikaji setiap keadaan atau situasi dan peristiwa yang terjadi dapat diamati dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian, secara prakteknya peneliti sekaligus menggali informasi dari subyek penelitian kemudian hasil penelitian diungkap dengan kalimat. Maksud penelitian dengan jenis pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dokumen, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>12</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah:

### a. Sumber data literer

Sumber data ini akan diperoleh dari buku karangan para ahli sesuai dengan masalah yang diteliti, termasuk buku referensi yang berhubungan dengan pembahasan penelitian serta dokumentasi PKNU.

---

<sup>11</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63

<sup>12</sup> Lexy J. Moelong, *metode penelitian kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya), 3

b. Sumber data lapangan

Yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian seperti sumber data manusia yang terdiri dari seluruh responden yang pernah bersentuhan dengan proses pemenangan, seperti caleg PKNU, tim sukses dan simpatisan partai PKNU.

3. Prosedur pengumpulan data.

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka digunakan beberapa pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan terhadap obyek penelitian langsung guna mengetahui kebenaran dan informasi tentang suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Penulis menggunakan observasi tidak terstruktur, dalam observasi ini peneliti tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi dan tidak menggunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.<sup>14</sup>

Metode ini digunakan untuk menggali data tentang strategi pemenangan pemilu legislatif PKNU di pulau Kangean.

---

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 106

<sup>14</sup> Dr. Sugiyono *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 146

b. Wawancara

Menggunakan wawancara tidak terstruktur, metode ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data tentang strategi pemenangan partai dan caleg. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Metode ini ditempuh dengan cara mencari data yang berhubungan dengan pemilu legislatif di pulau Kangean sehingga yang diperlukan dalam metode tersebut adalah buku-buku atau catatan lainnya, untuk mendapatkan data yang akurat dalam penulisan skripsi ini.<sup>16</sup>

4. Metode Analisa Data

Penelitian tersebut menggunakan analisa data dengan metode *diskriptif analisis* yang bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan pemilu legislatif PKNU untuk data yang diperoleh hasil dari buku, observasi, wawancara maupun dokumentasi PKNU.

Sedangkan teknik analisa data secara keseluruhan dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode *diskriptif analisis* yaitu

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 140

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),17

menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh secara teliti.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan sistematika pembahasan yang jelas, maka pada skripsi ini penulis mencoba menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I** adalah menguraikan pendahuluan bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenaan tentang rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, sumber-sumber yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** tentang Politik Islam serta Islam dan politik di Indonesia

**BAB III** berisi tentang profil Partai kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

**BAB IV** berisi tentang letak geografis dan lokasi penelitian.

**BAB V** adalah berisi analisis tentang hubungan PKNU dengan NU di pulau kangean serta strategi kemenangan pemilu legislatif PKNU pada pemilu legislatif 2009

**BAB VI** merupakan bab terakhir yang terdiri dari penutup atau kesimpulan dan saran.

---

<sup>17</sup>S Naasution, *Metode Research Pendekatan Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 106

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Islam dan Politik

Diskusi tentang hubungan Islam dan politik selalu menjadi perdebatan menarik di kalangan intelektual baik intelektual Indonesia maupun kalangan Indonesianis. Sebagian menganggap bahwa diskusi tema ini membosankan. Meskitak sedikit menganggap bahwa membicarakan hubungan antara Islam dan politik sepanjang masa akan selalu muncul. Effendy seperti mengutip beberapa intelektual seperti Isaiah Berlin, Sheldon Wolin, Levy Strauss serta David Easton mengatakan bahwa pemikiran politik Islam pada dasarnya masih berada pada tiga mazhab besar.<sup>18</sup>

*Pertama*, Islam dan politik tak dapat dipisahkan. *Kedua*, Islam dan politik itu bisa dipisahkan. *Ketiga*, Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang erat, akan tetapi hubungannya tidak bersifat legal formal, tetapi substansialistik.

Meski demikian, terdapat beberapa pandangan yang menelaah bagaimana posisi dan hubungan Islam dengan politik. Azra misalnya, mengatakan bahwa tinjauan terhadap hubungan Islam dengan politik dan sistem kenegaraan di masa awal Islam pada dasarnya tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*). Ini diilhami oleh faktor kesejarahan awal Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah kemudian

---

<sup>18</sup>Bachtiar Effendy, *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Serambi, 1996) hal. vi

membangun suatu bentuk negara kota (*city state*) mendorong pemikir Islam, semacam Al Maududi mengapresiasi sebagai negara teo-demokratik, karena selain bersifat ketuhanan juga berdasar pada prinsip *syura* (musyawarah).

Kemudian akibat modernisasi, terjadi proses sekularisasi oleh pemerintah-pemerintah Muslim mulai pada abad ke-19 yang diikuti munculnya gerakan modernisme Islam di dunia Arab dan anak benua India. Implikasinya, para pembaharu sekuler ini mendukung gagasan pemisahan antara agama dari politik, karena Islam hanya terbatas pada masalah moral dan individu (*privat*).<sup>19</sup>

Sementara itu dalam pandangan Syamsuddin, paling tidak terdapat tiga gagasan besar hubungan agama dan negara (politik) dalam wacana Islam.

*Pertama*, pandangan integralistik yang menilai bahwa Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap yang menghasilkan perspektif bahwa Islam adalah agama sekaligus Negara (*al Islam din wa dawlah*). Maka, kewajiban berpolitik juga salah satu kewajiban agama. *Kedua*, pandangan sekularistik yang memandang Islam sebagai agama yang mengurus persoalan vertikal dan tak mengurus masalah kenegaraan maupun politik. Kehadiran Nabi Muhammad SAW diutus untuk tujuan tunggal yakni mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan tidak untuk mendirikan dan mengepalai negara. *Ketiga*, pandangan simbiosis yang beranggapan bahwa dalam Islam

---

<sup>19</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 2-3

tidak terdapat sistem politik atau kenegaraan yang baku tetapi hanya menyediakan seperangkat tata nilai bagi kehidupan politik kenegaraan.<sup>20</sup>

Dari kalangan orientalis, Esposito melihat Islam bukan hanya sebagai agama yang bersifat ritual semata, tetapi komprehensif. Esposito mengatakan bahwa Islam tak hanya berdimensi kerohanian, melainkan juga berdimensi kenegaraan. Oleh karena itu, Islam berkembang sebagai gerakan politik. Esposito juga menjelaskan bahwa pemahaman totalitas Islam atau ketidakterpisahan antara Islam dan negara merupakan antitesa terhadap semua program penjajah.<sup>21</sup>

## **B. Islam dan Politik di Indonesia**

### **1. Islam dan Politik Era Revolusi**

Dalam masa revolusi ini, hubungan Islam dan politik dalam kondisi yang sangat kelam, yaitu hubungan yang ditandai dengan kecurigaan dan ketegangan. Pengalaman periode pertama ini merupakan *entrypoint* yang membuat politik Islam pada tahun 1970-1990-an berwarna, meminjam istilah Abdurrahman Wahid-komplementer dengan seluruh spektrum kehidupan politik nasional.<sup>22</sup>

Hubungan yang kelam ini disebabkan oleh dua hal, *pertama*, kebijakan pemerintah yang selalu memposisikan peran politik Islam pada wilayah marginal. Sehingga, berakibat pada perilaku politik umat Islam yang sering ingin melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap

---

<sup>20</sup>M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001) hal. XXX

<sup>21</sup>John L Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990) hal. 3

<sup>22</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta:Gema insane press, 1996), 160

negara. Sebab mereka merasa hak-hak politiknya sering di kekang dan dipangkas oleh negara. *Kedua*, paradigma politik Islam yang sempit memandang persoalan kaitan Islam dan politik. Paradigma itu sering bertentangan dengan fakta historis bangsa Indonesia, sehingga sering berakibat terjadinya ketegangan baik dengan negara maupun dengan masyarakat lain.<sup>23</sup>

Sikap negara yang sering memposisikan Islam secara marginal, sering berakibat kepada kemandekan pemikiran dan aktifitas politik Islam. Polemik tersebut melahirkan skeptisme para pemikir dan aktifis politik Islam terhadap negara. Mereka menganggap negara berusaha untuk menghilangkan arti Islam secara politik serta menerapkan kebijakan sekuler dan standar ganda.

Dalam masa revolusi dan tahun-tahun berikutnya, kalangan Islam yang berpolitik melanjutkan perjuangan politiknya. Dalam masa itu mereka juga aktif dalam perjuangan bersenjata lanjutan dari kegiatan politik. Dalam bidang politik peranan Islam sangat besar selama masa ini. Masyumi (November 1945) yang merupakan satu-satunya partai Islam pada waktu itu, dan merupakan pusat kekuatan politik, sehingga ia tidak pernah dipercayai memegang pemerintahan.<sup>24</sup>

Pada masa ini perlawanan politik terhadap pemerintah yang disemangati oleh aspek keagamaan terus berlangsung. Konsolidasi kekuasaan penjajah yang semakin luas, diancam oleh pemberontakan-

---

<sup>23</sup>*Ibid*, 17

<sup>24</sup>Ahmad Syafii Maarif. *Islam Dan Politik Teori Belah Bambu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 16

pemberontakan lokal dari perlawanan-perlawanan yang di inspirasikan Islam.<sup>25</sup>

Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan bahwa Islam telah dijadikan apa yang oleh Mc Turnan Kahin disebut sebagai “*senjata ideologis*” untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonial.<sup>26</sup> Maka tidaklah heran jika perkumpulan yang berbasis Islam semacam SDI (Sarekat Dagang Islam) sebagai gerakan massa pertama yang terorganisir secara politik, dianggap cikal bakal pertumbuhan nasionalisme.<sup>27</sup>

Contoh di atas tersebut memperlihatkan betapa dalamnya keterlibatan Islam dalam pergumulan politik.berpolitik bagi kalangan Islam dianggap sebagai bagian dari perjuangan yang sama sekali tak dapat dipisahkan dari ajaran dan syariat Islam itu sendiri. Allan A Samson berpendapat bahwa dari berbagai agama, Islam sangat mungkin merupakan yang paling sempurna dalam keteguhan menjalin hubungan langsung antara agama dan politik.<sup>28</sup>

## 2. Islam dan Politik Era orde lama

Dalam periode ini, hubungan Islam dan pemerintah dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi Islam karena kebijakan pemerintah yang diskriminatif berdasarkan kebijakan politik. Hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 17

<sup>26</sup> M. Syafi’I Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 3

<sup>27</sup> Ahmad Syafii Maarif. *Islam Dan Politik Teori Belah Bambu*, 3

<sup>28</sup> *Ibid*, 4

pembubaran partai Masyumi oleh pemerintah dan tinggallah partai Islam lain yang mulai menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah.<sup>29</sup>

Pergulatan politik di era orde lama dimulai dengan pertemuannya dua golongan yaitu Islam dan nasionalis, Islam yang diwakili oleh Masyumi dan nasionalis yang diwakili oleh PNI, Partai Masyumi mendapat tempat yang seimbang dengan PNI dalam Kabinet Republik Federal tetapi kondisi seperti itu tidaklah lama dirasakan oleh Masyumi, pukulan pertama yang diderita oleh Masyumi adalah tersisihnya ia dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I, yang memberi kesempatan bagi perkembangan NU sebagai partai, kedudukan Masyumi mulai tersaingi oleh kalangan sendiri setelah NU mendeklarasikan ikut berpolitik praktis.<sup>30</sup>

Pada kabinet juanda (1957-1959) oleh presiden Soekarno, Masyumi tidak duduk lagi dalam pemerintahan. Partai ini mengecam pembentukan yang dianggapnya melanggar konstitusi. Setelah berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959. Masyumi bagai menghadapi pendakian yang tak berujung. Bersamaan dengan itu konstituante dibubarkan, walau menurut ketuanya. Wilipo, pekerjaan tinggal 10 persen lagi selesai. Partai tersebut masih di wakili dalam DPR, tetapi dengan pembentukan DPR baru (DPR-GR) tahun 1960, ia pun praktis berada di luar lembaga legeslatif itu. Dan tepat pada Agustus 1960 Masyumi dibubarkan oleh presiden Soekarno.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Deliar Noer, *Islam Dan Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 102

<sup>30</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, 166

<sup>31</sup> Zainal Abidin Amir, *peta politik islam pasca soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2003), 43

Partai lain, termasuk partai sesama Islam seperti NU, PSII dan Perti tidak ada yang membela Masyumi, bahkan para partai ini turut dalam barisan Soekarno. Mereka semua menyokong kebijakan pemerintah, termasuk penetapan sebagai pemimpin revolusi, presiden seumur hidup dan seperangkat gelar “agung” lainnya.<sup>32</sup>

Mengekornya partai-partai Islam di belakang Soekarno tidak pula memperkuat kedudukan mereka, baik dalam pemerintahan maupun dalam parlemen. Tidak ada kursi penting dalam pemerintahan kecuali menteri agama, dan jumlah mereka dalam lembaga jangankan melebihi, menyamai jumlah wakil partai Islam dalam parlemen pada kabinet Ali Sastroamijoyo 1955 pun tidak, malah jauh berada di bawah angka hasil pemilihan umum tersebut.<sup>33</sup>

### 3. Islam dan Politik Era Orde Baru

Hubungan Islam dan politik pada masa ini, bersifat *resiprokal* yakni suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman di antara kedua belah pihak.<sup>34</sup> Khususnya mengenai format politik yang diidealisasikan bersama dan diharapkan mempertemukan kepentingan masing-masing.

Dalam periode ini negara semakin menyadari bahwa Islam merupakan dominasi politik yang tidak bisa di kesampingkan. Juga disadari bahwa upaya memarginalisasi peran Islam dalam kebijakan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 43

<sup>33</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, 166

<sup>34</sup> Muslih Fuadie, *Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Firdaus, 2005), 8

pembangunan merupakan tindakan yang kontra-produktif. Terutama setelah muncul realitas bahwa kalangan intelektual Islam yang merupakan produk orde baru, mempunyai potensi dan kecakapan teknikal yang dapat diandalkan untuk mendukung suksesnya pembangunan. Mereka ini secara sosiologis merupakan kelas menengah santri baru, yang partisipatif terhadap pembangunan nasional serta sangat intens dengan semangat intelektualisme Islam. Mereka ini memperkaya wawasan umat serta mempertemukannya dengan gagasan-gagasan dari pihak elite orde baru.<sup>35</sup>

Akhirnya dekade 1990-an, berkat artikulasi dan peranan intelektual muslim hubungan Islam dan orde baru berkembang menjadi saling akomodatif.<sup>36</sup> Hal ini ditandai semakin responsifnya birokrasi orde baru. Semakin membaiknya hubungan umat Islam dan orde baru itu ditandai dengan sejumlah kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Antara lain kebijakan mengenai Undang-Undang Pendidikan Nasional (1989), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam negeri dan menteri agama tentang efektifitas pengumpulan zakat (1999), dan salah satu di antaranya yang mendapat perhatian luas adalah persetujuan dan dukungan terhadap berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990.<sup>37</sup>

Namun dalam perkembangannya kemudian, ICMI ternyata tidak bisa lepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi

---

<sup>35</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, x.

<sup>36</sup> *Ibid*, 10

<sup>37</sup> *Ibid*, 12

politiknya, posisinya terhadap birokrasi, serta masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional.

Kehadiran ICMI telah menimbulkan kecemburuan dan ketegangan baru, itu muncul karena ICMI dianggap memperoleh keistimewaan-keistimewaan tertentu karena kedekatan hubungannya dengan pihak birokrasi dan pusat kekuasaan. Juga karena dalam perkembangan kemudian, ICMI dianggap telah ikut “*bermain*” dalam arena politik praktis yang menyepelekan kekuatan-kekuatan politik lain.<sup>38</sup>

Harmonisasi hubungan itu sendiri terjadi karena terjadi konvergensi antara umat Islam dan negara. Di dalam tubuh umat Islam telah terjadi pergeseran perjuangan aspirasinya dalam model formal struktural ke model pendekatan kultural substansial. Sehingga muncul jargon-jargon “*Islam Yes, Politik No*”, “*Negara Pancasila Sudah Final*”, dan “*Tidak Ada Negara Islam*”. Sedangkan pada saat yang sama, gerdakan Islamisasi secara kultural dengan melakukan berbagai kajian keislaman di segala lini kegiatan profesional dan birokrasi sipil dan militer telah membuahkan munculnya pemegang kebijakan yang mempunyai kesadaran, kepedulian, dan semangat keagamaan yang kuat dalam dirinya.<sup>39</sup>

Selain mengakomodasi pemikiran para cendekiawan muslim itu, pemerintah sendiri baik karena posisinya maupun kandungan konsepsinya,

---

<sup>38</sup> Zuli Qadir, M Iqbal Songell, *ICMI Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 35

<sup>39</sup> Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam Dan Negara Pancasila*, (Yogyakarta: PADMA), 134

juga secara sungguh-sungguh berusaha untuk mengisi secara konseptual tentang hubungan umat Islam dan pemerintah.

Reinterpretasi mereka terhadap gagasan-gagasan Islam tentang politik dan kenegaraan telah membentuk citra Islam yang inklusif, ramah, dan ilmiah di mata pemerintah. Ini mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi terwujudnya hubungan yang ramah antara umat Islam dan pemerintah orde baru.

Dengan kondisi semacam ini, pemerintah membuat langkah baru dengan mengfokuskan arah gerakannya pada perbaikan ekonomi dan politik. Karena itu pemerintah melakukan rekonstruksi politik dan ekonomi yang di arahkan modernisasi dengan mempergunakan pendekatan pragmatis dalam memecahkan persoalan yakni perbaikan ekonomi serta pembangunan dan stabilitas politik menjadi prioritas utama.

Maka ketika semua golongan politik sepakat bahwa modernisasi merupakan pilihan strategi serta satu-satunya alternatif dalam memecahkan persoalan yang di hadapi pemerintah dalam bentuk penancangan dan pelaksanaan pola umum pembangunan nasional melalui tahapan-tahapan pelitanya.<sup>40</sup>

Pilihan pemerintah untuk melangsungkan modernisasi memiliki dua implikasi politik yaitu; *pertama*, pemerintah, dengan demikian program-programnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang memberi dukungan dan partisipasi politiknya. *Kedua*,

---

<sup>40</sup> Muslih Fuadie, *Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia*, 10

dukungan dan partisipasi politik masyarakat pada giliran berikutnya akan mendukung kelangsungan proses pembangunan dan mengukuhkan posisi pemerintah karena terdapat keterputusan kesempatan dan peluang pembinaan kader-kader partai oleh para pemimpin politik. Dari sini diharapkan terjadinya interaksi dinamis antara partisipasi politik dengan pelembagaan politik dalam proses rekayasa politik, sebagai agenda pembangunan sosial politik pemerintah.

#### **4. Islam dan Politik Era Orde Reformasi**

Pergantian kekuasaan di Indonesia dari era orde baru ke era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan yang telah digenggamnya selama tiga puluh dua tahun pada 21 mei 1998 telah menyebabkan terjadinya perubahan drastis pada berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi dan pemerintah. Perubahan drastis dalam bidang politik pasca orde baru antara lain adalah: hilangnya kekuasaan yang represif dan bubarnya sistem *bureaucratik polity*-pemerintahan dipegang oleh segelintir orang berubah pemerintahan dipegang oleh perwakilan rakyat secara riil. Di samping itu juga lahir dan maraknya kehidupan demokrasi substansial dan sekaligus surutnya militer dalam menentukan kehidupan sosial politik secara formal.

Pada saat yang bersamaan, muncul kembali semangat berkelompok dan semangat kedaerahan, seperti lahirnya multi partai baik berdasar agama maupun non agama, serta lahirnya berbagai macam organisasi

kedaerahan yang diikuti dengan tuntutan referendum, otonomi daerah dan lain-lain.

Munculnya gugatan-gugatan terhadap sistem pemerintah orde baru pada bidang politik dan ekonomi menggambarkan kelemahan sistem kekuasaan orde baru yang menutup peluang bagi warga negaranya untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam mengelola negara Indonesia, terutama proses pengambilan keputusan.

Suasana kebebasan ini dimanfaatkan beberapa kekuatan Islam untuk membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Dan munculnya beberapa kelompok Islam yang tujuan utamanya adalah menerapkan syariat Islam di masyarakat Indonesia karena mayoritas adalah umat Islam.<sup>41</sup> Dan proses rekonstruksi konstitusi yang dilakukan MPR benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memperjuangkan aspirasi Islam, yaitu memasukkan tujuh kata ke dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1. Perjuangan ini dinilai perjuangan yang tertunda akibat keputusan Soekarno yang membubarkan konstituante lewat dikrit 5 juli 1959 dengan dukungan penuh dari TNI angkatan darat. Usaha ini akhirnya kandas telah mendapat penolakan dari kekuatan umat Islam yaitu NU dan Muhammadiyah.<sup>42</sup>

Era reformasi yang penuh keterbukaan dan kebebasan telah menggantikan suasana pemberangusan terhadap kebebasan dan segala bentuk perbedaan dengan kebijakan pemerintah. Era ini tengah melakukan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 135

<sup>42</sup>Zainal Abidin Amir, peta politik Islam pasca soeharto, 43

penataan kembali sistem politik dan ke-tata negaraan yang selama orde lama dan orde baru merupakan hal yang tabu dan disakralkan dan mustahil.<sup>43</sup>

Di tengah proses penataan kembali seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia inilah saat yang tepat untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran universal Islam menjadi sebuah landasan tata nilai di segala aspek kehidupan tanpa harus menyebut dan menggunakan label keislaman. Hal ini membutuhkan perjuangan yang gigih dan waktu yang panjang untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa paradigma yang dibangun di atas nilai-nilai Islam secara obyektif benar-benar sesuai dan cocok sebagai sumber tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah di butuhkan para pemikir Islam yang bisa memformulasikan perspektif Islam yang *rahmatan lil-alamin*.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Amin Rais, bahwa saat inilah momentum yang baik bagi umat Islam untuk tampil di pentas politik nasional dan mewarnai kebijakan publik. Apabila umat Islam tidak bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, bahkan bersikap menunggu lebih-lebih lagi mengabaikan, maka sangat bisa dimungkinkan umat Islam akan tertinggal dalam proses penentuan pengambilan kebijakan politik. Bahkan bisa lebih parah dari itu umat Islam akan terpinggirkan kembali sebagaimana yang di alami selama dua dasawarsa, 1960 dan 1970-an.

---

<sup>43</sup> Iwan Karmawan Arie, *cikal bakal kepemimpinan Amin Rais*, legenda reformis (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 31

<sup>44</sup> Bambang Trimansyah, *Para Tokoh di Balik Reformasi* (Bandung: Zaman Wacana Ilmu, 1998), 20

Kondisi politik yang sedang berpihak pada keterbukaan, maka umat Islam harus mau dan mampu memanfaatkan pertarungan wacana ini demi mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi tata nilai dan kebijakan publik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Zainal Abidin Amir, *peta politik islam pasca soeharto*, 52

## BAB III

### SETTING PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah pulau Kangean

Tak banyak orang yang kenal pulau ini, sebuah tempat yang terletak paling ujung propinsi Jawa Timur atau merupakan batas timur pulau Madura. Tak ada informasi yang valid mengenai siapa penemu pertama pulau ini, ada yang mengatakan tempat ini dihuni oleh pelarian-pelarian tahanan PKI hal tersebut disandarkan dengan adanya keturunan orang-orang Jawa yang menempati tempat-tempat tertentu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya pulau ini ditemukan oleh para nelayan yang berasal dari wilayah Sulawesi seperti Makassar hal ini diperkuat dengan temuan adanya penghuni yang mendominasi tempat disekitar daerah pesisir dengan suku Bugis, dan Bajo.

Sebenarnya pulau ini tak kalah menarik dari pulau Bali yang dapat banyak memikat para pengunjung, selain tempatnya yang berpasir putih ditambah rayuan tanaman kelapa yang mengelilingi di setiap pinggir pantai tentunya memberi kesan keindahan alam yang sangat luar biasa. Di kelilingi laut yang memberi Hasil ikan melimpah misalnya ikan layang di dusun Nyaplongdung desa Pabian merupakan hasil laut bagian utara sedangkan di bagian selatan yang banyak terdapat hutan bakau dapat menghasilkan nener dan benur alam.

Keindahan alam daratan yang molek juga bisa diterawang dengan cara mendaki ke gunung Patapan sebenarnya ini merupakan bukit tetapi oleh masyarakat lebih dikenal dengan istilah gunung. Dari ketinggian kurang lebih 300m dari permukaan laut akan nampak bukit-bukit yang lain mengitari pulau ini.

Keindahan wisata gua yang terkenal adalah gua kuning konon kabarnya bagi setiap orang yang mau masuk kedalamnya dapat memukul alat yang terbuat dari batu dan akan menghasilkan bunyi seperti gong yang menggema, warna gua ini juga kelihatan agak menguning, dinding gua akan terlihat lukisan alam dari batu, dan gambar binatang serta ada yang menyerupai gambar orang. Berbeda dengan gua petteng yang terletak di sebelah barat gua kuning yang berjarak sekitar 5 km ke arah barat. Gua ini dianggap oleh masyarakat sebagai gua tempat orang bertapa, banyak cerita-cerita yang beredar ditengah masyarakat bahwa disini juga tempat pelarian para pencuri hewan ternak yang nantinya akan dibawa keluar pulau kangean dengan perahu karena gua ini dekat dengan pantai utara kangean.

Adapun yang sangat unik dan menjadikan sebutan bahwa pulau ini merupakan pulau bekisar dimana berawal dari sinilah ayam bekisar yang mempunyai suara merdu itu berasal, hal tersebut juga telah dicantumkan dalam kamus ensiklopedi Indonesia. Bekisar merupakan ayam yang indah karena itu merupakan hasil perkawinan silang dengan ayam hutan secara alami. Banyak orang-diluar pulau kangean yang mencari dan memburu

ayam satu ini sehingga sekarang keberadaanya agak sulit ditemukan. Selain faktor dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang langka sehingga pelestariannya tidak dijaga. Talar kangean (talar minyan) adalah jenis padi yang beraroma tinggi serta sangat enak rasanya. Jenis Padi ini dulunya banyak ditanam para petani kangean kemudian dari hasil tanam tersebut banyak masyarakat luar pulau kangean yang tertarik dan mereka menjadikannya sebagai oleh-oleh khas Kangean.<sup>46</sup>

## 2. Keadaan Geografis

Kangean adalah gugusan pulau yang terletak di sebelah ujung timur Pulau Madura, Laut Jawa. Kepulauan ini terdiri dari sedikitnya 60 pulau, dengan luas wilayah 487 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau terbesar adalah Pulau Kangean (188 km<sup>2</sup>), Pulau Paliat, dan Pulau Sapanjang. Pulau Kangean bagian timur terdapat pegunungan dan puncak tertingginya 364 m. Kecamatan Arjasa membawahi Pulau Kangean bagian barat, Kangayan membawahi Pulau Kangean bagian timur, sedangkan Sapeken membawahi pulau-pulau kecil dan mendominasi bagian timur kepulauan Kangean (antara lain Sapeken, Paliat, Sadulang besar, Sadulang kecil, Pagerungan besar, dan Pagerungan kecil)

Berikut Daftar beberapa Pulau yang ada di Kepulauan Kangean:

- (1) Pulau Kangean (2) Pulau Bungin (3) Pulau Mamburit (5) Pulau Karinting (6) Pulau Meungan (7) Pulau Pagerungan Besar (8) Pulau Pagerungan Kecil (9). Pulau Paliat (10). Pulau Sapeken (11). Pulau

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Mbok Mobar, Tanggal 01/01/2011

Sabuntan (12). Pulau Sadulang Besar (13). Pulau Sadulang Kecil (14).  
Pulau Saebus (15). Pulau Sagubing (16). Pulau Sakala (17). Pulau  
Sapangkor Besar (18). Pulau Sapangkor Kecil (19). Pulau Sapanjang  
(20). Pulau Saseel (21). Pulau Sitabo (22). Pulau Saubi (23). Pulau  
Saur (24). Pulau Sediri Besar (25). Pulau Tajaan (26). Pulau Talengki.

### 3. Keadaan Demografis

#### a. Kecamatan Arjasa

##### I. Sex Ratio Penduduk Laki-laki Terhadap Perempuan

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Buddi	1,016	1,059	95.94
2	Gelaman	1,484	1,606	92.40
3.	Pajanagger	2,965	3,098	95.71
4	Sawahsumur	1,062	1,185	89.62
5	Paseraman	1,659	1,776	93.41
6	Kalinganyar	1,088	1,151	94.53
7	Arjasa	1,693	1,913	88.50
8	Duko	2,662	2,649	100.49
9	Kolo Kolo	2,527	2,613	96.71
10	Angkatan	2,825	3,084	91.60
11	Kalisangka	1,543	1,510	102.19
12	Laok Jangjang	1,598	1,184	134.97
13	Bilis-Bilis	1,520	1,762	86.27
14	Sumberangka	979	1,038	94.32
15	Kalikatak	2,614	2,865	91.24
16	Angon-Angon	1,734	1,767	98.13
17	Sambakati	1,411	1,621	87.05
18	Pandeman	1,043	1,102	94.65
19	Pabian	519	586	88.57
Jumlah		31,942	33,569	95.15

Sumber: Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

## II. Luas dan Kepadatan Penduduk

No	Desa	Laus (Km2)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Buddi	52.97	39
2	Gelaman	27.87	111
3.	Pajanagger	36.51	166
4	Sawahsumur	13.06	172
5	Paseraman	11.61	296
6	Kalinganyar	4.62	485
7	Arjasa	1.47	2,453
8	Duko	9.01	589
9	Kolo Kolo	36.01	143
10	Angkatan	18.35	322
11	Kalisangka	2.07	1,475
12	Laok Jangjang	0.76	3,661
13	Bilis-Bilis	7.84	419
14	Sumberangka	1.16	1,739
15	Kalikatak	4.1	1,336
16	Angon-Angon	3.8	921
17	Sambakati	4.62	656
18	Pandeman	3.23	664
19	Pabian	2.91	380
Jumlah		241.97	271

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010  
Kecamatan Dalam Angka 2009

### b. Kecamatan Kanganan

Kecamatan kanganan adalah salah satu kecamatan yang ada di pulau kanganan yang terletak di ujung timur pulau kanganan.

## XVII. Luas Wilayah Kecamatan dan Banyaknya Dusun

No	Desa	Banyaknya Dusun	Luas (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saobi	8	13,25
2.	Kanganan	8	46.47
3.	Torjek	7	47.68
4.	Cangkraman	2	12.55

5.	Tembayangan	2	13.86
6.	Batuputih	2	18.98
7.	Daandung	6	20.70
8.	Timur jangjang	8	12.19
9.	Jukong Jukong	4	19.00
Jumlah		47	206.68

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

Kecamatan kangayan adalah kecamatan yang membawahi kangean bagian timur, kecamatan kangayan merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari kecamatan Arjasa pada tahun 2004.

### XVIII. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Desa	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saobi	115.70	1.209.20	1,324.90
2.	Kangayan	90.00	4,557.02	4,647.02
3.	Torjek	105.10	4,663.39	4,768.49
4.	Cangkraman	134.70	1,120.04	1,254.74
5.	Tembayangan	308.30	1,077.82	1,386.12
6.	Batuputih	350.50	1,547.80	1,898.30
7.	Daandung	-	2,069.93	2,069.93
8.	Timur jangjang	-	1,218.73	1,218.73
9.	Jukong Jukong	8.70	1,891.45	1,900.15
Jumlah		1,113.00	19,355.38	20,468.38

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

#### *Kecamatan Dalam Angka 2009*

Kecamatan Kangayan lebih kecil dibanding kecamatan Arjasa, kecamatan Kangayan hanya memiliki jumlah 9 desa sementara kecamatan Arjasa memiliki 19 desa.

**XIX. Sex Ratio Penduduk Laki-laki Terhadap Perempuan**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saobi	1.610	1.771	90,91
2.	Kangayan	2.136	2.351	90,85
3.	Torjek	1.703	1.867	91,22
4.	Cangkraman	545	600	90,83
5.	Tembayangan	474	522	90,80
6.	Batuputih	521	575	90,61
7.	Daandung	1.935	1,729	111,91
8.	Timur jangjang	1.503	1.375	109,31
9.	JukongJukong	849	888	95,61
Jumlah		11.276	11.678	96.56

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

**XX. Luas Wilayah dan Kecamatan Penduduk**

No	Desa	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saobi	13,26	255
2.	Kangayan	46,48	97
3.	Torjek	47.69	75
4.	Cangkraman	12,56	91
5.	Tembayangan	13,87	72
6.	Batuputih	18.99	58
7.	Daandung	20,71	177
8.	Timurjangjang	12,2	236
9.	JukongJukong	19.01	91
Jumlah		204,77	112

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

**Kecamatan Dalam Angka 2009**

1. *Dilihat dari aspek Pendidikan*

**XXI. Banyaknya Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Yang ditamatkan**

No	Desa	Jenjang Pendidikan				Jumlah
		SD	SMP	SMU	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Saobi	419	81	39	20	559
2.	Kangayan	720	239	99	28	1.086
3.	Torjek	633	214	101	23	971
4.	Cangkraman	146	36	21	9	212
5.	Tembayangan	180	48	25	10	263
6.	Batuputih	183	44	35	25	287
7.	Daandung	472	109	40	15	636
8.	Timurjangjang	342	98	48	17	505
9.	JukongJukong	219	24	8	5	256
	Jumlah	3.314	893	416	152	4.775

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

Menurut data di atas, pulau kangean masih merupakan pulau yang secara pendidikan masih lemah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di kabupaten Sumenep.

**XXII. Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak Guru dan Murid**

No	Desa	SD	Guru	Murid	
				Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	1	4	13	10
2.	Kangayan	1	5	19	12
3.	Torjek	1	5	16	14
4.	Cangkraman	-	-	-	-
5.	Tembayangan	-	-	-	-
6.	Batuputih	-	-	-	-
7.	Daandung	-	-	-	-
8.	Timurjangjang	-	-	-	-
9.	JukongJukong	-	-	-	-
Jumlah		3	14	48	36

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

**XXIII. Banyaknya Sekolah Dasar Negeri Guru dan Murid**

No	Desa	SD	Guru	Murid	
				Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	4	22	94	91
2.	Kangayan	4	27	234	222
3.	Torjek	3	27	269	250
4.	Cangkraman	1	9	44	52
5.	Tembayangan	1	9	50	69
6.	Batuputih	1	16	57	52
7.	Daandung	3	23	221	191
8.	Timurjangjang	3	17	120	122
9.	JukongJukong	2	17	134	122
Jumlah		22	167	1.223	
1.171					

**XXIV. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama Negeri  
Guru dan Murid**

No	Desa	SMPN	Guru	Murid	
				Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	-	-	-	-
2.	Kangayan	1	19	34	34
3.	Torjek	-	-	-	-
4.	Cangkraman	-	-	-	-
5.	Tembayangan	-	-	-	-
6.	Batuputih	-	-	-	-
7.	Daandung	-	-	-	-
8.	Timurjangjang	-	-	-	-
9.	JukongJukong	-	-	-	-
Jumlah		1	19	42	
34					

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

*Kecamatan Dalam Angka 2009*

**XXV. Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah  
Guru dan Murid**

No	Desa	MI	Guru	Murid	
				Lk	Pr
(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	2	24	132	147
2.	Kangayan	4	48	176	170
3.	Torjek	3	35	120	123
4.	Cangkraman	-	-	-	-
5.	Tembayangan	-	-	-	-
6.	Batuputih	-	-	-	-
7.	Daandung	1	12	38	37
8.	Timurjangjang	2	33	174	176
9.	JukongJukong	-	-	-	-
Jumlah		12	152	640	
653					

**Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010**  
*Kecamatan Dalam Angka 2009*

**XXVI. Banyaknya Madrasah Tsanaiyah  
Guru dan Murid**

No	Desa	MTs	Guru	Murid	
				Lk	Pr
(1)	(20)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	1	17	56	65
2.	Kangayan	2	33	189	230
3.	Torjek	2	29	42	63
4.	Cangkraman	-	-	-	-
5.	Tembayangan	-	-	-	-
6.	Batuputih	-	-	-	-
7.	Daandung	1	29	38	35
8.	Timurjangjang	2	-	-	-
9.	JukongJukong	-	-	-	-
Jumlah		6	108	325	393

**Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010**

**XXVII. Banyaknya Madrasah Aliyah  
Guru dan Murid**

No	Desa	MA	Guru	Murid	
				Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	1	12	32	32
2.	Kangayan	2	47	154	137
3.	Torjek	-	-	-	-
4.	Cangkraman	-	-	-	-
5.	Tembayangan	-	-	-	-
6.	Batuputih	-	-	-	-
7.	Daandung	-	-	-	-
8.	Timurjangjang	-	-	-	-
9.	JukongJukong	-	-	-	-
Jumlah		3	59	186	
169					

**Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010**

***Kecamatan Dalam Angka 2009***

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pulau kangean khususnya di kecamatan kangayan dilihat dari aspek pendidikan merupakan daerah yang masih tertinggal melihat jumlah sekolah yang ada sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di kabupaten Sumenep.

Justeru yang lebih maju adalah pendidikan swasta dari Madrasah Ibtida'iyah, madrasah tsanawiyah sampai ke madrasah Aliyah.

2. *Dilihat dari aspek Kesehatan*

**XXVIII. Banyaknya Sarana Kesehatan**

No	Desa	RSU/RSI	Puskesmas	Puskesmas	
				Pembantu	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	-	-	1	-
2.	Kangayan	-	1	-	-
3.	Torjek	-	-	1	-
4.	Cangkraman	-	-	-	1
5.	Tembayangan	-	-	1	-
6.	Batuputih	-	-	-	1
7.	Daandung	-	-	-	1
8.	Timurjangjang	-	-	1	-
9.	JukongJukong	-	-	-	1
Jumlah		-	1	4	4

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pulau kangean merupakan daerah yang secara aspek kesehatan sangat lemah dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di kabupaten Sumenep khususnya yang berada di daratan.

3. *Dilihat dari aspek Keagamaan*

**XXIX. Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Agama**

No	Desa	Masjid	Musholla/surau	Gereja	Kuil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saobi	5	12	-	-
2.	Kangayan	6	8	-	-
3.	Toerjek	3	8	-	-
4.	Cangkramaan	1	4	-	-
5.	Tembayangan	1	4	-	-
6.	Batuputih	3	5	-	-
7.	Daandung	4	8	-	-
8.	Timur jangjang	4	6	-	-
9.	JukongJukong	3	4	-	-
Jumlah		30	59	-	-

Sumber : Bappeda Sumenep tanggal 27/12/2010

### ***Kecamatan Dalam Angka 2009***

Kangean terkenal dengan dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, ada suku madura, mandar, bajo dan bugis yang berasal dari Sulawesi.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pulau Kangean khususnya kecamatan Kangayan merupakan daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam bahkan tidak ada yang memeluk agama lain selain Islam.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. PROFIL PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya PKNU**

Partai politik merupakan pilar demokrasi, karena partai politik memiliki peran yang sentral dalam menentukan terwujudnya demokrasi. Dalam mewujudkan demokrasi dalam suatu negara, ada prasyarat yang mendasar yang harus dipenuhi di dalamnya, yaitu adanya supremasi hukum. Setiap warga negara harus mentaati dan menjunjung tinggi serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berpijak pada kesadaran seperti itu, adanya konflik kepengurusan di dalam partai kebangkitan bangsa (PKB) telah diikhtiarkan penyelesaiannya melalui instrument demokrasi yang digariskan oleh ketentuan pasal 14 undang-undnag No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, yaitu musyawarah dan kemudian melalui pengadilan.

Konflik kepengurusan di dalam tubuh PKB bermula dari adanya pemberhentian ketua umum dewan tanfidz DPP PKB Alwi Shihab, karena yang bersangkutan diangkat menjadi menteri koordinator kesejahteraan rakyat republik Indonesia pada kabinet Indonesia bersatu periode 2004-

2009, dan yang bersangkutan telah bersedia untuk memangku jabatan tersebut.<sup>47</sup>

Terpilinya Alwi Shihab sebagai ketua umum dewan tanfidz DPP PKB dilakukan dalam forum permusyawaratan tertinggi partai disebut muktamar dan ditetapkan dalam ketetapan muktamar PKB. Namun kemudian diberhentikan tidak dalam forum yang sama dan atau setingkat muktamar, melainkan hanya melalui rapat pleno dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa (rapat pleno DPP PKB) dan kemudian ditetapkan melalui surat keputusan DPP PKB (SK DPP PKB).<sup>48</sup>

Sebelum mengambil langkah hukum melalui proses pengadilan, sebenarnya telah diupayakan penyelesaian konflik kepengurusan PKB ini (khususnya kasus pemberhentian ketua umum dewan tanfidz DPP PKB Alwi Shihab) melalui musyawarah atau biasa disebut *ishlah*. Para kiai khususnya yang tergabung dalam forum kiai langitan, yang sejak awal berdirinya PKB merupakan *the founding fathers* serta dalam perjalanan kesejahteraan PKB merupakan *stake holders* dari PKB, telah menyampaikan seruan (*taushiyah*) kepada DPP PKB agar Alwi Shihab di kembalikan fungsinya sebagai ketua umum dewan tanfidz DPP PKB guna mempertanggung jawabkan kinerjanya di hadapan muktamar.<sup>49</sup>

Oleh karena langkah korektif yang dilakukan para kiai ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif, maka kemudian ketua umum dewan

---

<sup>47</sup> Mohammad Thohadi, SH, MSi, *Tinjauan Ilmu Hukum Tentang Keabsahan Partai Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Agung*, (Lakumham PKB Maret 2006), 244

<sup>48</sup> Surat Keputusan DPP PKB No. 0103/DPP-01/III/A.1/IV/2002

<sup>49</sup> Mohammad Thohadi, *Kronologis Peristiwa Konflik PKB*, (Lakumham PKB Maret 2006), 246

tanfidz DPP PKB Alwi Shihab mengambil langkah perjuangan hukum melalui proses peradilan sejalan dengan tuntutan dan *taushiyah* para alim ulama khususnya para kiai forum langitan maupun UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Setelah proses panjang, maka dalam proses pengadilan yang telah sampai pada tingkat akhir di Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan gugatan ketua umum tanfidz DPP PKB. Alwi Shihab.<sup>50</sup>

Masalah yang kemudian muncul adalah, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal, 5 November tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak yang kalah dalam perkara ini sebagai putusan yang tidak perlu ditaati, karena menurut mereka putusan tersebut tidak secara tegas menyangkut kepengurusan mana yang sah. Tidak adanya sikap menghormati hukum dan ketidak patuhan terhadap hukum dalam hal ini putusan MA RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal 15 November 2005 tentu saja berakibat biasanya status hukum kepengurusan PKB, yang semestinya sudah jelas dan tegas. Kenyataan ini makin berlanjut ketika pemerintah dalam hal ini menteri hukum dan Hak Asasi manusia RI tidak memiliki ketegasan sikap hukum untuk menindak lanjuti. Putusan MA RI No.1896 K/PDT/2005 tertanggal 15 November 2005.<sup>51</sup>

Dalam ranah politik, sebagaimana banyak ditulis para ahli politik hukum, bahwa hukum kerap kali ditafsirkan berdasarkan sudut pandang kepentingan politiknya. Sedangkan budaya politik hukum seperti inilah

---

<sup>50</sup> Ibid,247

<sup>51</sup> Ibid, 248

yang justru menyebabkan tidak kunjung terwujudnya supremasi hukum di negeri ini. Karena itu, menjadi tugas kita bersama bahwa hukum hendaknya ditafsirkan dan diletakkan di atas semua kepentingan politik praktis, dan harus dijadikan sebagai rel bagi semua orang dalam menapaki kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan seterusnya.

Dalam kerangka untuk menafsirkan putusan MA RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal 15 November 2005 secara obyektif dan tidak diintervensi kepentingan politik praktis, sangat arif tindakan DPP PKB meminta pendapat ahli hukum atau ilmu hukum. Karena pendapat ahli hukum atau ilmu hukum memiliki kewibawaan dan sifat yang lebih obyektif.

## 2. Lahirnya PKNU

Fenomena tersebut menjadikan para ulama yang tergabung dalam tim 17 untuk melahirkan partai baru yakni PKNU yang lahir pada tanggal 21 November 2006 di pondok pesantren Langitan, Widang Tuban, Jawa Timur.

Dalam manifesto pendiriannya, dijelaskan bahwa PKNU didirikan oleh para ulama sebagai wadah politik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*iqamatil haq wal 'adl*). Kelahiran partai ini harus dimaknai sebagai kebangkitan nasional "dari" (*minal*) ulama. Melalui PKNU, ulama menjadi motor menandai kebangkitan nasional kedua untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah rusak. Alasan didirikannya PKNU karena:

“didorong oleh keinginan para ulama untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara yang mengalami keterpurukan berkepanjangan di semua sektor kehidupan. PKNU menghendaki terciptanya tatanan sosial dan politik di Indonesia selaras dengan visi keagamaan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sehingga tercapai harmonisasi serta menghindari benturan antara agama dan negara (*li-islāh al-ummah diniyyatan wa ijtima'iyatan, iqtishodiyyan wa siyasiyyatan, fiqriyyatan wa akhlaqiyyatan*).”<sup>52</sup>

#### a. Visi dan Misi PKNU

Visi PKNU adalah menciptakan negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (*baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air.

Sedangkan Misi PKNU adalah tercermin dari tiga bentuk tanggung jawab yang diemban utama. Pertama adalah tanggung jawab keagamaan (*mas'uliyah diniyyah*). Yakni, ulama menjadi penjaga keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah (*mas'uliyah diniyyah Islamiyyah 'ala thariqati Ahlussunnah Wal Jama'ah*) sebagai kerangka berpikir dan bertindak dalam beragama dan berbangsa sehingga antara agama agama dan negara tumbuh bersama saling mengisi dan tercapai harmonisasi.<sup>53</sup>

Tujuan Dan Usaha Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

- 1) Memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam

---

<sup>52</sup> Situs resmi DPP PKNU, [www.pknu.org](http://www.pknu.org) (diakses 06/01/2011)

<sup>53</sup> Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) *Partai Kebangkitan Nasional Ulama* Bab V Pasal 7 (DPP PKNU 2007)

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 2) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.
- 3) Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
- 4) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, religius, terbuka, bersih dan berbudi luhur dan berakhlak karimah.

Untuk mencapai tujuan, partai melakukan usaha sebagai berikut:

1) Bidang agama

Meningkatkan ketaqwaan dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kehidupan yang beradab dan bermartabat.

2) Bidang ideologi

Menjaga dan selalu mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjadi pemersatu bangsa.

3) Bidang politik

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,

melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

4) Bidang hukum

Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

5) Bidang ekonomi

Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

6) Bidang sosial budaya

Berusaha membangun yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

7) Bidang pertahanan dan keamanan

Membangun kesadaran setiap warga terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi dalam masyarakat.

8) Bidang pendidikan

Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.<sup>54</sup>

Tanggung jawab kedua yang dipikul ulama adalah dengan umat (*mas'uliyah* atau *asasiyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*). Kebutuhan umat baik yang primer, sekunder maupun aksesoris ini menjadi tanggung jawab ulama untuk memenuhi agar tercapai kesejahteraan.

Ketiga, tanggung jawab ulama yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (*mas'uliyah wathaniyyah*) terkait tanggung jawab ini, para ulama meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Keyakinan ini harus senantiasa dikawal melalui artikulasi (perjuangan) politik ulama agar cita-cita negara republi indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud sebaik-baiknya.

#### **b. Asas dan prinsip dasar PKNU**

Partai berasaskan Islam Ahlussunnah wal jama'ah, prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menumbuhkan persaudaraan yang sejati, persamaan dan kebersamaan, menjaga persatuan, perdamaian,

---

<sup>54</sup> K.H. Ma'ruf Amin, *Kenapa Harus PKNU* (20 Hujjah Alasan Pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama), 15

toleransi dan tolong menolong, membela yang teraniaya serta menegakkan keadilan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>55</sup>

Asas merupakan ciri khusus yang dapat membentuk karakter politik bagi sebuah partai. Bagi PKNU, asas Islam *ahlussunnah wal jama'ah* bermakna mendasar untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat (*tawassuthiyyah*), toleran (*tasamuiyyah*), reformis (*ishlahiyyah*), dinamis (*tahawwuriyyah*), dan bermetode (*mahajiyyah*).<sup>56</sup>

### c. Kepengurusan PKNU

Susunan kepengurusan partai pada masing-masing tingkatan organisasi partai sebagaimana di maksud pada pasal 12 anggaran dasar terdiri dari:

#### 1) Dewan Mustasyar

Adalah memimpin tertinggi yang membimbing, mengendalikan dan menjaga kemurnian khittah perjuangan partai.

#### 2) Dewan Syura

Adalah memimpin tertinggi partai yang membuat dan menerapkan pedoman umum kebijakan partai untuk menjadi rujukan pertama pelaksanaan kebijakan-kebijakan partai.

#### 3) Dewan Tanfidz

---

<sup>55</sup> AD-ART PKNU Bab III Pasal 3-4 (DPP PKNU)

<sup>56</sup> K.H. Ma'ruf Amin, *Kenapa Harus PKNU* (20 Hujjah Alasan Pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama), 13

Adalah memimpin eksekutif partai yang membuat dan menjalankan kebijakan strategi partai, mengelola organisasi dan program partai<sup>57</sup>

Untuk pertama kalinya susunan dewan pengurus pusat (DPP) adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

a) Deklarator dipimpin oleh K.H. Abdullah Faqih (selaku rais).

Anggota-anggota: K.H. Abdullah Chudlori, K.H. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, K.H. Ahmad Warson Munawwir, K.H. Muhaiminan Gunardo, K.H. Idris Marzuki, K.H. Nurul Huda Djazuli, K.H. Ma'ruf Amin, K.H. Abdullah Sechal, K.H. Abdul Hamid Baidhawi, K.H. Shaleh Qasim, K.H. Hasbullah Badawi, K.H. Abdul Adzim Suhaimi, K.H. Mas Muhammad Subadar, K.H. Humaidi Dachlan, Lc., K.H. M. Thahir Syarkawi, Habib hamid Bin Hud Al-Attos, K.H. Achmad Basyir, K.H. Aniq Muhammadun.

b) Dewan Mustasyar (dewan pertimbangan) dipimpin oleh K.H. Ma'ruf Amin (selaku ketua)

Anggota-anggota: K.H. Abdullah Faqih, K.H. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, K.H. Zainal Abidin Munawwir, K.H. Muhaiminan Gunardo, K.H. Achmad Basyir, K.H. Abdullah Sechal, K.H. Idris Marzuki, K.H. Nurul Huda Djazuli, K.H. Mas Muhammad Subadar, K.H. Mansyur Shaleh, K.H.

---

<sup>57</sup> AD-ART PKNU Bab III pasal 3-4 (DPP PKNU), 11

<sup>58</sup> Ibid, 15

Hasbullah Badawi, K.H. Afif Astari, K.H. Abdul Baidhowi,  
Habib Syaqqaf Aljufri, K.H. Abdul Jalil Ma'ruf, K.H. Hasan  
Syarif, K.H. Chairuddin Rais, K.H. Abdurrahman, K.H. Ahmad  
Damiri, K.H. Ahya Al-Anshari, K.H. Abdul Aziz Afandi,  
Habib Hamid Bin Hud Al-Attos, Hj. Nihayah Achmad Siddiq,  
Hj. Umroh Thalbah Mansyur.

c) Dewan Syura (dewan permusyawaratan)

Ketua: KH. Abdurrahman Chudlori

Wakil ketua: KH. Ahmad Warsad Munawwir, KH. Ubaidillah  
Faqih, KH. Anwar Khaddar, KH. Chumaidi Dahlan, KH.  
Muhammad Tahir Syarkawi.

Sekretaris Dewan Syuro: H. Alwi Shihab

Wakil Sekretaris: KH. Ali As'ad

Anggota-anggota:

KH.R. Mohammad Cholil As'ad, KH. Saleh Qosim, KH.  
Hasan Aminuddin, KH. Muchtar Amin, KH. Machrus,  
KH. Abdul Haq, KH. TGK. Rajali Irsyad, KH. Sulton Daeng  
Rowi, KH. Amin Asikin, KH. Abdul Latif Faqih, KH. Abdul  
Adzin Suhaimi, KH. Aniq Muhammad, KH. Amin Siradj.

d) Dewan Tanfidz (dewan eksklusif)

Ketua; Drs. Choirul Anam

Ketua-ketua: R. Saleh Abdul Malik, H. Heflin Frinces, MA.  
Chudori Sitompul, SH, Ir. H. Muchtar Thahir, Muhammad

Nasif, SE, Dra. Hj. Geferina Djohan, MA. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH. MM.

Sekretaris Jenderal: Dra. Muhammad Jamaluddin, Ir. Galih Fahrudin Qurbani, Zainal Abidin Amir, H. Ahmad Ni'am Syukri, Abdullah Mufied Mubarak.

Bendahara: H. Ridwan Zai

Wakil Bendahara: Dipo Nusanara, SH, Bambang Sungkono, H. Abdul Chalim, Irwan Cik Murod, Hj. Farichatul Aini, Jakin Sobri, MM.<sup>59</sup>

**d. Butir-butir kesepakatan rapat tim 17 pendiri PKNU**

- 1) Para Kiai/ulama sepakat (*ittifaq*) untuk mendirikan partai baru sebagai kelanjutan PKB ulama.
- 2) Nama partai disepakati Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dengan catatan dapat disempurnakan ataupun dapat diubah dalam muktamar mendatang.
- 3) Lambang partai disepakati tetap seperti rancangan semula dengan catatan dapat disempurnakan ataupun diubah dalam muktamar mendatang.
- 4) Asas partai disepakati Islam Ahlussunnah wal jama'ah atau (maksudnya) Islam ala (menurut paham) Ahluussunnah wal jama'ah. Prinsip perjuangan partai akan disempurnakan dalam

---

<sup>59</sup> AD-ART PKNU Bab XV pasal 24 (DPP PKNU), 17

muktamar mendatang dengan menghilangkan kata-kata yang dapat menimbulkan kontroversi.

- a) Tujuan partai adalah memperjuangkan tegaknya Islam ahlussunnah wal jama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD 1945.
- b) Kepengurusan PKNU merupakan kelanjutan PKB ulama yang disempurnakan sesuai ketentuan internal partai dan akan diadakan perubahan atau pergantian kepengurusan baru yang definitif dalam muktamar yang akan datang dengan mengacu pada kriteria pokok harus kader yang benar-benar berpaham ahlussunnah wal jama'ah.
- c) Struktur kepengurusan partai ditambah satu kotak atau kamar untuk dewan mustasyar, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut: susunan kepengurusan partai di semua tingkatan terdiri dari: a) dewan mustasyar b) dewan syura c) dewan tanfidz, dewan mustasyar tidak termasuk dalam kategori kepengurusan harian, tetapi memiliki hak veto dalam segala proses penyelesaian persoalan partai.
- d) Rapat tim 17 merekomendasikan kepada partai (DPP PKNU) agar segera melaksanakan muktamar pertama, paling lambat pertengahan tahun 2007, apabila proses pendirian dan

pendaftaran serta pengesahan partai oleh Departemen Hukum dan HAM dinyatakan telah selesai.<sup>60</sup>

TIM 17 PENDIRI PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA  
(PKNU)

- K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban, Jawa Timur)
- K.H. Ma'ruf Amin (Tanara, Banten)
- K.H. Abdurahman Chahori (Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah)
- K.H. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin (Panji, Situbondo, Jawa Timur)
- K.H. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jawa Timur)
- K.H. Ahmad Warson Munawwir (Krapyak, DI Yogyakarta)
- K.H. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung, Jawa Tengah)
- K.H. Abdullah Sechal (Bangkalan, Madura, Jawa Timur)
- K.H. Shaleh Qasim (Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur)
- K.H. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri, Jawa Timur)
- K.H. Hasbullah Badawi (Cilacap, Jawa Tengah)
- K.H. Abdul Adzim Suhaimi (Mampang Prapatan, DKI Jakarta)
- K.H. Mas Muhammad Subadar (Pasuruan, Jawa Timur)
- K.H. Humaidi Dachlan, Lc. (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)
- K.H. M. Thahir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan)
- Habib hamid Bin Hud Al-Attos (Cililitan, DKI Jakarta)
- K.H. Aniq Muhammadun (Pati, Jawa Tengah)

---

<sup>60</sup> K.H Abdullah Zain dan Muhammad Kaiyiz 9 Alasan Kia-Kiai Tidak Lagi Bersama Gusdur (DPP PKNU 2007), 13

## B. MUKTAMAR PKNU

Terobosan dilakukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Bila acara muktamar lazimnya diadakan di hotel atau di gedung pertemuan, maka PKNU mengadakan muktamar di atas kapal laut. Atas ide uniknya itu, PKNU masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia sebagai partai politik pertama yang mengadakan muktamar di atas kapal.

PKNU mendapatkan penghargaan dari Sri Widyanti sebagai manajer MURI, Piagam penghargaan tersebut diserahkan kepada Ketua Umum PKNU Choirul Anam sesaat sebelum Kapal Motor Penumpang Lambelu yang menjadi ajang muktamar lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Ini peristiwa unik dan langka Memang sudah banyak kegiatan yang dilakukan di atas kapal, namun untuk kongres atau muktamar partai, ini yang pertama kali, Muktamar PKNU digelar di atas kapal KMP Lambelu milik PT PELNI dalam pelayaran dari Tanjung Perak menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 13-14 Desember 2010. Pembukaan muktamar dilakukan di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Bangkalan, Madura.

Muktamar diikuti sekitar 2.000 peserta yang berasal dari pengurus DPP, 27 dari 33 DPW, dan 267 dari 400-an DPC PKNU se-Indonesia. penyelenggaraan muktamar PKNU di atas kapal laut ini bukan dimaksudkan untuk mengejar sensasi. Namun untuk mengingatkan kader, juga rakyat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara bahari atau maritim. Dalam laporannya muktamar ini menghabiskan dana Rp1, 29 Miliar.

Penggelaran muktamar di atas kapal yang dioperasikan PT PELNI tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara bahari, negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, sehingga pembangunan yang dilakukan seharusnya berorientasi maritim.

PKNU menilai sejauh ini belum ada upaya serius bangsa Indonesia untuk menggarap sektor kelautan, padahal jika sektor itu dioptimalkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi modal yang besar dalam membina pola hubungan antar bangsa.

Kita seharusnya bukan saja memfokuskan pada bagaimana menggali dan mengeksplorasi sumber daya yang ada, tetapi juga fokus pada sumber daya manusia yang mampu menjadikan laut sebagai sarana meningkatkan kemampuan kita dalam bersaing di era globalisasi.

PKNU telah memutuskan untuk menjadikan isu-isu kelautan sebagai bidang garapan yang diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi partai berideologi Islam ahlussunnah wal jamaah itu. Muktamar pertama ini akan menjadi ajang konsolidasi PKNU. Pada Pemilu 2009 lalu konsolidasi PKNU memang kurang karena baru setahun berdiri sudah langsung ikut pemilu.

Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang digelar di atas Kapal Lambelu dan menyusuri Laut Jawa, akhirnya memilih dua calon ketua secara aklamasi. Keduanya adalah Ketua Dewan Syura DPP PKNU KH Abdul Adhim Suhaimi dan Ketua Dewan Tanfidz DPP PKNU Choirul Anam. Keduanya dipilih dan dikehendaki oleh seluruh muktamirin tanpa proses

pemilihan. Hanya saja, Ketua Dewan Tanfidz masih sempat melalui proses pemilihan hingga putaran pertama. Dari hasil pemilihan, Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam, sempat mendapat 220 suara.

“Mengacu pada tatib (tata tertib), suara yang diperoleh lebih dari 40 persen sehingga terpilih secara aklamasi, Sementara itu, pemilihan ketua dewan syura berlangsung alot sebab kandidat kuat yang diprediksi mulus dan dipilih secara aklamasi, KH Abdul Adhim Suhaimi (Jakarta) mendapat saingan dari kandidat lain yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Alwi Shihab.

Dari hasil perhitungan suara, Mbah Dhim, panggilan akrab KH Abdul Adhim Suhaimi, mendapat 120 suara dan Alwi Shihab hanya 87 suara. Berhubung perolehan suara sangat ketat dan bisa memenuhi syarat 20% untuk menuju putaran kedua, pimpinan sidang langsung menanyakan kesanggupan kepada dua kandidat. Di hadapan muktamarin, Mbah Dhim menyatakan siap mengemban amanah untuk maju menjadi ketua dewan syura.

Sedangkan Alwi Shihab yang tidak ada di lokasi muktamar membuat panitia kebingungan untuk meminta pernyataan sikap sanggup maju atau tidak. Baru setelah beberapa jam kemudian, panitia berhasil mengonfirmasi Alwi melalui ponsel. Dia menyatakan secara tegas tidak maju menjadi ketua dewan syura dan sebaliknya mendukung penuh Mbah Dhim untuk menjadi ketua.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> <http://news.okezone.com> diakses tanggal 15/01/2011

## **BAB V**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Hubungan PKNU dengan NU di Pulau Kangean.**

NU adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam ranah keagamaan dan juga kemasyarakatan. Organisasi Islam terbesar yang didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asyari dan KH. Wahab Hasbullah dengan berlandaskan paham ahlus sunnah wal jama'ah. Selain itu, NU menganut empat madzhab dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah islamiyah. Di bidang sosial, NU mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan di akherat. Namun dalam perjalannya tepatnya pada tahun 1952 NU merubah dirinya menjadi partai politik.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) adalah partai yang tumbuh di tengah-tengah orang-orang NU yang merasa aspirasinya tidak dapat terwakili lagi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NU adalah organisasi sosial keagamaan sedangkan PKNU adalah organisasi politik, keduanya adalah wadah yang secara organisasi berada dalam ranah yang berbeda akan tetapi PKNU dengan NU tidak dapat dipisahkan karena para tokoh PKNU juga merupakan tokoh NU.

Dalam kegiatan-kegiatan PKNU masih banyak kesamaan dengan apa yang ada di dalam tradisi NU seperti melakukan istighosah, di kangean

hubungan PKNU dengan NU sangat erat itu dibuktikan dengan kemenangan caleg PKNU dalam pemilu legislatif 2009 yang bisa melampaui perolehan suara caleg-caleg yang lain seperti caleg PKB dan PPP.

Warga NU kangean lebih percaya terhadap PKNU dari pada PPP dan PKB untuk mewakili aspirasinya di parlemen karena caleg dari PPP dan PKB yang ada sebelumnya tidak bisa berbuat banyak terhadap kemajuan masyarakat kangean yang warganya mayoritas NU. Hal itu juga terjadi karena para tokoh dan kiai yang selama ini menjadi tokoh yang ditaati oleh masyarakat NU kangean sudah berada di tubuh PKNU dan tidak lagi berada di PKB pasca konflik berkepanjangan yang dialami oleh PKB.

*“Caleg PKB dan PPP tak enga’ ka jhenjina monla dheddi DPR tak mekkere rakyat”*

*Artinya. “ caleg dari PKB dan PPP ingkar janji kalau sudah menjadi anggota dewan dan tidak memikirkan rakyat”.*<sup>62</sup>

Sangat rasional apabila mayoritas warga NU kangean menjalin hubungan baik dengan PKNU apalagi mendukung sepenuhnya kepada PKNU, karena dalam persoalan dukungan partai warga NU kangean memiliki prinsip bahwa perkataan kiai-kiai besar adalah benar.

*“odhi’ norok PKB mate norok ulama”*

*artinya “hidup ikut PKB kalau mati ikut ulama”*<sup>63</sup>

Akan tetapi kenyataannya setelah kiai-kiai yang fatwanya sangat didengar dan ditaati yang dulu masih di PKB sekarang berada di PKNU maka otomatis mereka beralih dukungan pula terhadap PKNU.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan warga, tanggal, 31/12/20010

<sup>63</sup> Wawancara,dengan k. Zainur Ihasan, tanggal 01/01/2010

*Kaule mele caleg PKNU polana oreng kangean dhire' jhu caleg PKB ben PPP tak bisa epartaje*"<sup>64</sup>

*Artinya. " saya pilih caleg karena dia putra daerah sementara dari caleg PKB dan PPP tidak bisa dipercaya".*

## **B. Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif PKNU 2009 di Pulau Kangean.**

Pemilihan Umum secara langsung dan berdasarkan perolehan suara terbanyak (bukan berdasarkan nomor urut) merupakan pengalaman pertama dalam proses perekrutan seorang Kepala Pemerintah Daerah maupun anggota legislatif di Indonesia. Demam pilkada kini telah menyebar hampir merata di berbagai daerah. Pertarungan membangun citra kian hingar bingar seiring berbagai publisitas yang dimainkan oleh media.

Pemilu 2009 memiliki fenomena unik, yakni perubahan mendasar pada situasi politik sebelum dan sesudah pemilu. Fenomena tersebut misalnya dapat terlihat dari perilaku caleg PKNU yang mensosialisasikan diri dalam waktu beberapa bulan saja sebelum pemilu dilaksanakan. Dan caleg PKNU yang merupakan partai baru dan masih tergolong partai kecil, sukses memperoleh suara yang sangat signifikan dan bias mengantarkan calegnya ke parlemen khususnya di kangean.

Di Indonesia setiap pemilih memberikan dua suara, suara pertama akan diberikan pemilih pada satu kandidat dari daerah pemilihannya, kandidat ini bagaimanapun akan duduk di parlemen, oleh karena itu disebut mandat langsung. Suara kedua digunakan pemilih untuk memilih partai, suara yang diperoleh melalui suara kedua ini sangat menentukan jumlah kursi di parlemen

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan warga pendukung PKNU tanggal, 02/01/2011

dan penghitungan berdasarkan sistem proporsional. Kampanye adalah sebuah kegiatan yang banyak makan tenaga dan menghabiskan biaya, pertimbangan apa saja yang diperlihatkan parpol dalam perencanaan kampanye, dan bagaimana strategi-strategi secara konkrit kampanye pemilu 2009 perlu dipertimbangkan secara matang untuk meraup suara semaksimal mungkin.

Untuk bisa bersaing dengan partai besar dalam perebutan kursi di parlemen, butuh tekad dan strategi yang matang, agar harapan yang ditargetkan dapat menjadi kenyataan. Demikian pula yang coba digagas Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) diwujudkan melalui kegiatan pembekalan calon legislatif (Caleg).

Masing-masing caleg tentu mempunyai strategi yang berbeda, tergantung dapil dan orientasi masing-masing, oleh karena itu segmentasi dan sasarannya harus jelas agar strategi yang dibangun dapat berjalan dan bermanfaat.

Penulis menggolongkan analisa data dibawah berdasarkan konsep strategi politik caleg PKNU yang menang yang akan dipaparkan di bawah ini:

**a. Merumuskan Misi**

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) di mana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Misi yang digunakan caleg adalah berperan dalam

1. membangun pemerintahan yang bersih dalam kegiatan pemerintah Sumenep menuju Kangean yang lebih maju.
2. Mencoba untuk meminimalisir dikotomi pembangunan antara daratan dengan kepulauan kangean yang selama ini terkesan timpang serta memberikan apresiasi dan penghargaan yang lebih layak terhadap peranan para tokoh agama yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan keagamaan.

Hal ini karena para tokoh agama yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah Sumenep, seperti peran para guru ngaji yang cenderung berjalan sendiri padahal kontribusinya sangat besar terhadap generasi muda dalam memberikan pengetahuan keagamaan.

*“guru-guru ngaji butuh perhatian dari pemerintah karena keberadaannya sekarang semakin sedikit padahal mereka adalah pahlawan dan keberadaannya harus diperhatikan”.*<sup>65</sup>

Misi ini dirumuskan secara optimis sehingga menjadi realistis dan dapat memberi motivasi yang positif bagi tim sukses yang bekerja untuk mencapai misi tersebut. Dalam strategi politik, juga membicarakan sebuah produk yang perlu diperdagangkan dan ditawarkan di pasar pemilih.

Produk yang ditawarkan oleh caleg ini adalah profil individu. Profil caleg ini jelas meliputi citra secara umum yang berhubungan dengan masyarakat seperti dikenal sebagai figur yang cerdas, jujur, dapat bersosial dengan masyarakat. Peranan individu terhadap masyarakat sangat berperan penting ditunjukkan dengan tingkat popularitas yang dimiliki. Caleg ini

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Caleg PKNU tanggal 25/12/2010

memiliki simpati tertinggi dalam mayoritas masyarakat apalagi caleg ini merupakan anak dari seorang tokoh masyarakat.

**b. Pencitraan**

Caleg ini memiliki citra sebagai seorang kepala keluarga yang bijaksana, adil dan berwibawa dalam membina keluarga sehingga keluarganya sangat menghormatinya dan menaati perintahnya, perilaku dalam lingkungan sosial yang peduli dengan kepentingan masyarakat NU sehingga mendapat dukungan penuh dari warga NU Kangean. Caleg ini mendapat dukungan para tokoh dan kiai Madura dan Situbondo yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat kangean khususnya masyarakat NU.

Kekuatan yang dimiliki caleg ini adalah terletak pada program yang ditawarkan lebih baik, lebih berkenaan dengan keadaan masyarakat NU dan memiliki posisi yang kuat di Pulau Kangean serta memiliki tim sukses yang handal sehingga di beberapa tempat caleg ini berhasil menempatkan dirinya dalam masyarakat NU.

**c. Target**

Target atau sasaran desa/kelurahan yang digunakan untuk kampanye adalah semua desa/kelurahan yang ada di Kangean, terutama desa/kelurahan yang tingkat ketidak pedulian (angka golput)nya masih tinggi seperti dusun-dusun di pelosok-pelosok.

Hasilnya caleg ini mampu mendapat dukungan mayoritas di semua desa karena mayoritas masyarakat kangean merupakan warga NU.

#### **d. Instrumen-instrumen kunci**

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Instrumen yang digunakan caleg ini adalah propaganda dan menjalin hubungan masyarakat. Propaganda yang digunakan adalah melakukan pergerakan pada massa basis dan massa non basis. Massa basis adalah warga NU yang terakomodasi dalam PKNU, sedangkan massa non basis adalah masyarakat umum yang menawarkan mensejahterakan kepentingan bersama.

Dan menjelaskan bahwa dirinya mendapat restu dari seorang Kiai besar untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan di kabupaten Sumenep. Caleg ini juga membuktikan ketika beliau mengundang kiai berpengaruh untuk mengisi pengajian dan doa bersama untuk kemenangan caleg ini.

*“Saya rela mengundang kiai dan nyalter helikopter untuk membawa kiai ke kangean”.*<sup>66</sup>

#### **e. Implementasi strategi**

Dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia dengan melakukan kesepakatan yang dilakukan antara tim sukses, masyarakat dan caleg tersebut dengan menggunakan pergerakan NU semacam massa basis (warga NU) non basis (bukan warga NU tetapi mendukung),

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Caleg PKNU tanggal 25/12/2010

menggunakan bantuan pengurus struktural yang ada di PKNU dan warga NU yang ada di kangean.

Caleg ini menggunakan pendekatan kepada para tokoh masyarakat:

1. *Kepala Desa*

Kepala Desa adalah orang nomor satu di desanya yang punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, ini yang membuat caleg ini melakukan pendekatan kepada kepala Desa untuk bisa bekerjasama dalam membangun rakyat dari segala bentuk kekurangan jika terpilih menjadi anggota legislatif.

2. *Ulama atau kiai pesantren.*

Di kangean pesantren adalah lembaga pendidikan formal yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai sarana menimba ilmu, pendekatan yang dilakukan caleg ini kepada pesantren-pesantren untuk mensosialisasikan misinya dalam peningkatan kualitas pendidikan di pulau kangean khususnya di pondok pesantren, karena selain mengajarkan pendidikan umum layaknya sekolah-sekolah negri, pondok pesantren juga mengajarkan kitab-kitab dan keagamaan yang bias membentuk akhlak yang baik untuk anak didik.

*“Pondhuk ngajere mandiri ka santrena ben bisa amasyarakat”*

*Artinya.” Pndok pesantren mengajarkan kemandirian dan bisa bermasyarakat”.<sup>67</sup>*

3. *Kiai kampong atau guru ngaji*

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan wali santri di pondok pesantren Raudlatul Amin, tanggal 31/12/2010

Selain kiai pesantren guru ngaji sangatlah besar pengaruhnya terhadap masyarakat di kangean karena prinsip *sami'na wa atha'na* masyarakat kangean terhadap kiai sangat tinggi.

Hal ini bisa dilihat dari desa-desa yang masih mengikuti pilihan seorang guru ngaji dalam pemilu.

*“manabi pelean partai otabe caleg kaula ama'mum ka guru”*

Artinya, “kalau soal pilihan dalam pemilu baik partai maupun caleg saya berma'mun kepada guru (guru ngaji).

#### 4. Masyarakat umum

Yang dimaksud masyarakat umum disini adalah caleg ini selalu aktif menghadiri kegiatan atau perkumpulan di kalangan NU seperti pengajian, shalawatan, manakiban dan tahlilan, karena masyarakat NU akan menilai orang yang menghadiri kegiatan seperti tersebut di atas merupakan sosok yang baik dan mempunyai kepedulian terhadap sesama.

*“oreng raje mon ghik ghellem noro' pangajian berarti ghik endi' ate bherse”.*

artinya”orang besar(sukses)kalau masih mau mengikuti pengajian berarti orang itu masih memiliki hati yang bersih”.

Hal ini yang kemudian menjadikan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap caleg ini bisa mewakili aspirasinya untuk kemajuan kangean kedepan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Munculnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagai wadah aspirasi warga NU tidak terlepas dari tujuan masyarakat NU itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik lahir maupun batin.

Strategi yang dipakai oleh caleg PKNU dalam pemilu legislatif 2009 di pulau kangean adalah melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat NU karena NU adalah merupakan kelompok mayoritas di dapil tersebut.

Melakukan silaturahmi dengan cara door to door adalah cara mudah dan praktis untuk mensosialisasikan misi dan program-program yang akan diagendakan caleg ini bila memenangkan pemilu dan menjadi anggota DPRD.

Selain karena popularitasnya sebagai putra daerah caleg ini juga memiliki citra baik dalam pandangan masyarakat dan selalu bersilaturahmi pada Kiai-Kiai dan tokoh masyarakat.

#### **B. Temuan**

Dalam implementasi strateginya selain menggunakan pencitraan kepada masyarakat caleg ini juga menggunakan beberapa pendekatan:

1. Caleg ini menggunakan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama.
2. Caleg ini selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya kegiatan warga NU.

3. Dalam kampanye caleg ini mengundang Kiai yang berpengaruh di masyarakat kangean untuk mengisi acara pengajian dan memberi *tausiyah* kepada masyarakat.

### **C. Saran**

- a. Bagi seorang caleg dan calon kepala daerah hendaknya melihat peta politik di daerah pemilihannya sebelum menentukan strategi yang akan dipakai.
- b. Bagi seorang caleg dan calon kepala daerah harus memiliki program yang berkenaan langsung dengan masyarakat.
- c. Bagi para caleg hendaknya mengenali kultur masyarakatnya atau calon pemilih di daerahnya.
- d. Bagi caleg atau tim sukses yang dapilnya mayoritas warga NU hendaknya aktif menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh warga NU.
- e. Bagi politisi hendaknya melakukan cara-cara yang baik dan terpuji dalam mengalahkan lawan politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zain dan Muhammad Kaiyiz 9 Alasan Kia-Kiai Tidak Lagi Bersama Gusdur DPP PKNU 2007.
- AD/ART Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Bab I Pasal 1, DPP PKNU, 2007.
- AD-ART *Partai Kebangkitan Nasional Ulama* Bab V Pasal 7 (DPP PKNU 2007.
- AD-ART PKNU Bab III Pasal 3-4 (DPP PKNU)
- Al-Maududi, Abdul A'la. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Drs. Asep Hikurat. 1991.
- Amin, Ma'ruf. *Kenapa Harus PKNU 20 Hujjah Alasan Pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama*. Jakarta: DPP PKNU 2007
- Amir, Zainal Abidin. *Peta Politik Islam Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Andree, Feillard. *NU vis-à-vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKis, 1999.
- Anwar, M. Syafi'I. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arie, Iwan Karmawan. *Cikal Bakal Kepamimpinan Amin Rais*, legenda reformis, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Aziz, Abd. *Politik Islam* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bellah, Robert N. *Beyon Believe: Menemukan kembali Agama*. Terj. Rudi Adi Syah Alam, 1992.
- Effendy, Bachtiar. *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Serambi, 1996.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fuadie, Muslih. *Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Firdaus, 2005.
- <http://news.okezone.com> diakses tanggal 1 5/01/2011
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Politik Teori Belah Bambu*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Noer, Deliar. *Islam Dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Nugroho, Taufiq. *Pasang Surut Hubungan Islam Dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: PADMA, 1999.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoneasia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Qadir, Zuli. M Iqbal Songell, *ICMI Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Sadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, 1990.

- Sahar L. Hassan, Kwat Sukardiyono, Dadi M.H. Basri, *Memilih Partai Islam, Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta:Gema Insani Press, 1990.
- Situs resmi DPP PKNU, [www.pknu.org](http://www.pknu.org) (diakses 06/01/2011)
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surat Keputusan DPP PKB No. 0103/DPP-01/III/A.1/IV/2002
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thohadi, Mohammad. *Kronologis Peristiwa Konflik PKB*, Lakumham PKB Maret 2006.
- Tinjauan Ilmu Hukum Tentang Keabsahan Partai Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Agung*, Lakumham PKB Maret 2006.
- Trimansyah, Bambang. *Para Tokoh di Balik Reformasi*, Bandung: Zaman Wacana Ilmu, 1998.

## INTERVIEW GUID

### A. Pertanyaan

1. Apakah seorang pemimpin harus memiliki kharisma?
2. Bagaimana pendapat anda tentang seorang pemimpin harus memiliki kekayaan?
3. Apakah seorang caleg harus memiliki pendidikan minimal SLTA?
4. Apakah anda pernah berdialog langsung dengan warga?
5. Bagaimana pengalaman anda terhadap organisasi?
6. Jabatan apa saja yang pernah anda duduki?
7. Bagaimana misi anda dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD?
8. Apa program yang anda tawarkan terhadap warga?
9. Sejak kapan anda aktif di PKNU?
10. Strategi apa yang anda gunakan dalam berkampanye?
11. Bagaimana cara anda mendekati warga?
12. Bagaimana anda meyakinkan warga untuk memilih anda?
13. Daerah mana yang menjadi sasaran kampanye anda?
14. Bagaimana tim sukses membantu anda dalam berkampanye?
15. Bagaimana cara anda memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika anda menjadi anggota DPRD?

## B. BIODATA INFORMAN

Nama Lengkap : Muhammad Husin, S,Hi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 18 Maret 1979  
Alamat Rumah : Perum Satelit No. 33 Sumenep  
Pendidikan Terakhir : S-1 UNISMA MALANG 1999-2003  
Pengalaman Organisasi : Aktivis PMII Cab. Malang  
Ketua DPC PKNU Sumenep 2010-2015  
No. Telp/HP : 081913670380

Nama Lengkap : Nur Mulyadi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep 30 Juli 1981  
Alamat Rumah : Ds. Tajjan, Kangayan, Sumenep  
Pendidikan Terakhir : D-II BTC Surabaya 2002-2004  
Pengalaman Organisasi : Coordinator Lapangan Penyuluhan Wira Usahawan  
Se-Jawa Timur 2006-2008  
No. Telp/HP : -----

Nama Lengkap : Zahroeny Janae, S, Pdi, CHt  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 10 April 1983  
Alamat Rumah : Jl. Simpang Kayuaro, Kangayan, sumenep  
Pendidikan Terakhir : S-1 STIKA ANNUQAYAH Sumenep 2003-2007  
Pengalaman Organisasi : Ketua BPD Ds. Kangayan  
No. Telp/HP : 081330177660

Nama Lengkap : Mahrawi Djamaluddin, S, Pdi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep 20 Agustus 1984

Alamat Rumah : Ds. Angon-Angon, Arjasa, Sumenep  
Pendidikan Terakhir : S-1 UIN SUKA Yogyakarta 2004-2008  
Pengalaman Organisasi : Aktivis PMII cab. Yogyakarta  
No. Telp/HP : 08170062842

Nama Lengkap : Zainur Ihsan, S,H  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 10 Januari 1979  
Alamat Rumah : Ds. Kayuaro, Kangayan, Sumenep  
Pendidikan Terakhir : S-1 UNISMA MALANG 1999-2005  
Pengalaman Organisasi : Aktivis HMI Cab. Malang  
No. Telp/HP : 081333040414



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS USHULUDDIN SURABAYA

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD IKBAL

Jurusan : politik Islam (PI)

Nomor Induk Mhsw. : E34205003

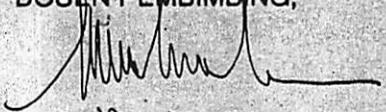
Pembimbing : AINUR ROFIQ AL-AMIN, S.H., M.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	07 - Okt - 2010	proposisi skripsi	A A A A A A A A A A
	15 - Okt - 2010	Revisi proposal	
2.	26 - Okt - 2010	Bab II	
	03 - Okt - 2010	Revisi Bab II	
3.	15 - Nov - 2010	Bab III	
	25 - Nov - 2010	Revisi Bab III	
4.	02 - Des - 2010	Bab IV	
	10 - Des - 2010	Revisi Bab IV	
5.	12 - Des - 2010	Bab V	
	14 - Des - 2010	Revisi Bab V	
6.	18 - Jan - 2011	BAB VI	
	25 - Jan - 2011	Revisi Bab VI	
7.			
8.			
9.			
10.			

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PEMENANGAN PEMILU LEGISLATIF PARTAI  
KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA DI PULAU KANDAU  
KABUPATEN SOTMENEH

Surabaya, 25 Jan. 2011

DOSEN PEMBIMBING,

  
Ainur Rofiq Al-Amin





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8438369 - 8410298 Fax.031-8413300 E-mail : ushuluddin@sunan-ampel.ac.i

**SURAT TUGAS**

Nomor : In.02/1/PP.00.9/688 /ST/IV/2010

1. Instansi Pemerintah RI yang memberikan tugas : Dekan Fak.Ushuluddin IAIN Sunan Ampel
2. Nama Pegawai yang diberi tugas : Ainur Rofiq Al-Amin, SH, M.Ag.
3. NIP : 197206252005011007
3. Pangkat Jabatan Ruang Pegawai tersebut : Penata (III/c) Lektor
4. Alamat : Jl Ahmad Yani 117 Surabaya
5. Yang bersangkutan diberi tugas untuk : **Membimbing Skripsi**
6. Mahasiswa : Mohammad Ikbal
7. NIM : E34205003
8. Judul Skripsi : Strategi pemenangan pemilu legislative Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di pulau Kangean kabupaten Sumenep.
9. Tugas tersebut berlaku mulai dan sampai dengan : tanggal 15 Desember 2010 s/d selesai.
10. Keterangan lain-lain : Harap dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 15 Desember 2010.

Dekan,



DR. H. MA' SHUM, M. Ag

NIP: 196009141989031001

4



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Raung No. 12 ☎ (0328) 662 203 - 662 128

SUMENEP

Kode Pos 69411

Sumenep, Desember 2010

Nomor : 072/1397/435.206/2010  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian/  
Survey/Research

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
dan Pembangunan Daerah  
Kab. Sumenep;  
2. Sdr. Ketua KPU Kab. Sumenep;  
3. Sdr. Ketua Partai Kebangkitan  
Nasional Ulama Kab. Sumenep  
di -  
**SUMENEP**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam  
Negeri Sunan Ampel Surabaya :

Tanggal : 14 Desember 2010  
Nomor : In.02/1/TL.00/680/IV/2010

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung jawab : **MUHAMMAD IKBAL**  
N I M : E34205003  
Alamat : Jl. Kerapu - Kolor  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/ Survey/Research/Pengambilan  
Data/Praktek Kerja Lapangan di wilayah kerja Saudara :

Judul : **"STRATEGI PEMENANGAN PEMILU LEGISLATIF  
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA  
(PKNU) DI PULAU KANGEAN KABUPATEN  
SUMENEP "**

Peserta : -  
Waktu : 21 s/d 31 Desember 2010

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas  
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SUMENEP



**H. ACH. SADIK, S.Sos**

Pemuka Tingkat I

NIP. 19540301 197902 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Dekan Fak. Ushuluddin Institut  
Agama Islam Negeri Sunan  
Ampel di Surabaya,  
2. Sdr. yang bersangkutan